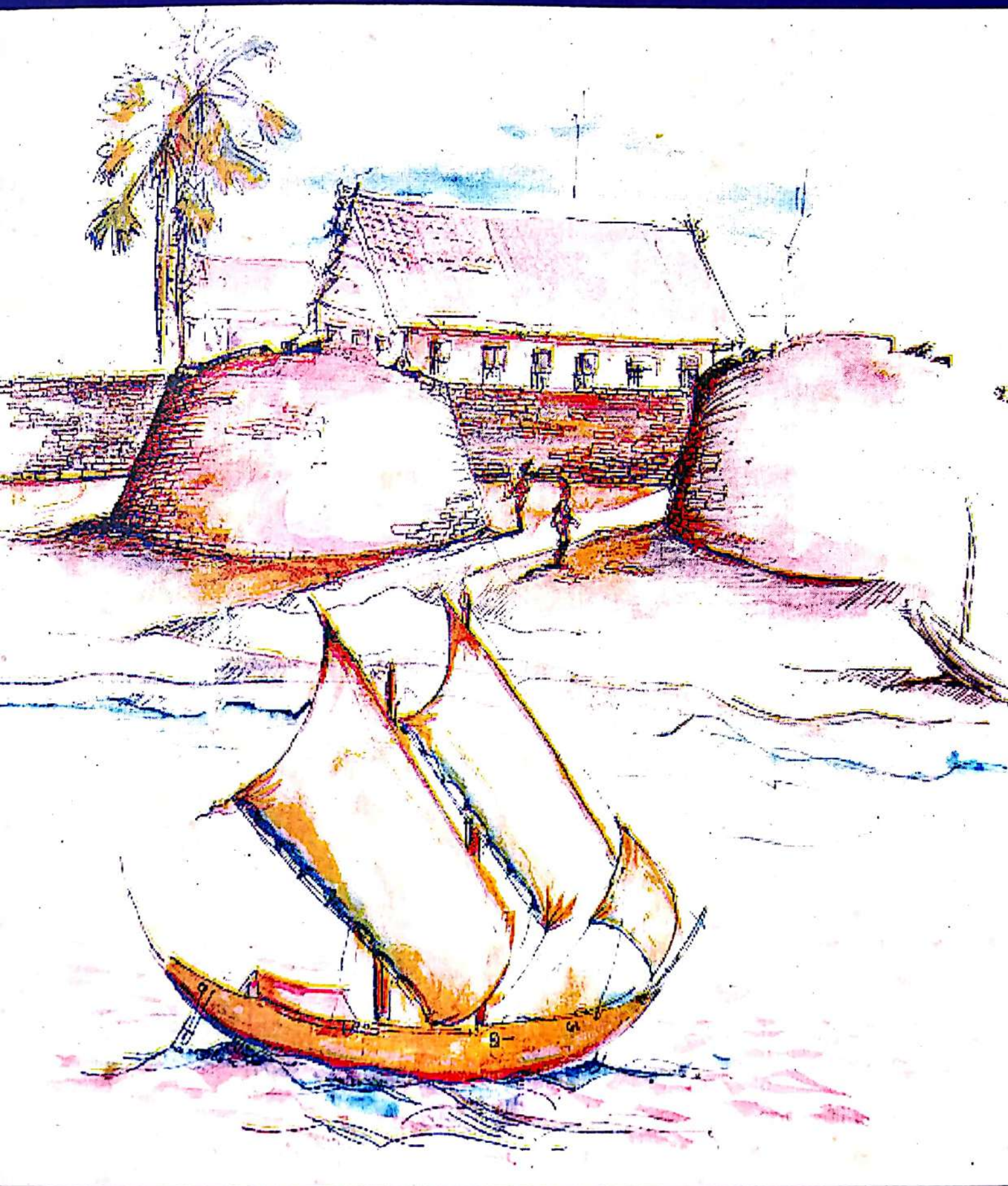






Somba Opu



Diterbitkan oleh
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Prop. Sulselra

Pelindung
Direktur Ditlinbinjarah

Penasehat
Kakanwil Depdikbud Prop. Sulsel

Pemimpin Umum
Bahru Kallupa

Wakil Pemimpin Umum
Bachri Sjamsu

Pemimpin Redaksi
Muh. Hidayat M.

Wakil Pemimpin Redaksi
Muslimin A.R. Effendy

Dewan Redaksi
Albertinus, Nusriat, Irwani Rasyid,
Nikolaus, Moh. Natsir, Raslan

Tata Letak/Perwajahan
Nurbiyah Abubakar, Yana Asriadi, Jamaluddin

Alamat Redaksi
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra
Kompleks Benteng Ujung Pandang
Telepon (0411) 321701, 321702, 331117, Fax. 321701
Ujung Pandang 90111

Diterbitkan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara yang dimaksudkan sebagai media informasi masalah-masalah Arkeologi, Sejarah, Antropologi dan Kebudayaan. Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel dan ringkasan hasil-hasil penelitian. Redaksi dapat menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

PENGANTAR

Redaksi

Kemajuan yang dicapai oleh pendahulu-pendahulu kita di masa silam merupakan sebuah fenomena menarik untuk ditelusuri kembali. Yang tertinggal dari masa lalu hanyalah fragmen-fragmen informasi yang terpisah, dan tampak merupakan suatu pemahaman, sehingga rasanya cukup untuk menenteramkan hati, karena pemahaman dari kelampauan itu adalah suatu hal yang mungkin, jika tidak dikatakan berlebihan. Pemahaman dengan kerangka berpikir yang sistimatis dapat menuntun kita untuk mencapai pemahaman yang sesungguhnya, bahkan berguna untuk merasakan getaran perubahan dari masa lalu itu. Mungkin dengan begini, tradisi membuat perbandingan antara dua masa yang berbeda, masa lalu dan masa kini, tidak akan terjadi. Dan kalau itu menjadi pilihan kita akan sama halnya dengan menambah "dosa antar generasi". Suatu hal yang sangat naif. Tetapi, bukankah sejarah itu selalu menunjuk kepada kelampauan dan kekinian serta masa datang di mana kekinian merupakan kelanjutan dari kelampauan itu untuk menuju masa depan ?

Dari sinilah muncul pernyataan, mengambil pelajaran dari masa lampau untuk memahami masa kini dalam rangka pengembangan masa depan. Pernyataan ini dapat melahirkan diktum-diktum yang berhubungan dengan kegunaan mempelajari sejarah. "Sejarah membuat manusia bijaksana, dan orang yang tidak mengenal sejarah adalah manusia yang selama hidupnya menjadi kanak-kanak". Artinya, sejarah akan menuntun pendewasaan pemikiran sehingga mampu melihat setiap permasalahan secara kritis, tidak mudah larut dalam perubahan yang sedang berlangsung, juga tidak menumbuhkan manusia cengeng yang terlalu mengagungkan masa lalu.

Bertolak dari pemikiran di atas, Suaka PSP Sulselra menerbitkan buletin ini yang diberi nama **"Somba Opu"**. Somba Opu diambil dari nama salah satu benteng utama kerajaan Gowa, Benteng Somba Opu. Somba Opu dapat juga menunjuk pada sebuah ibukota kerajaan Gowa, kota dagang dan pusat kekuasaan yang paling berpengaruh di nusantara pada abad ke-17. Kehadiran Somba Opu memiliki nilai historis yang sarat dengan muatan ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang kajian sejarah, arkeologi, arsitektur dan budaya.

Pada edisi perdana ini, kami tampilkan tulisan yang mengulas tentang peninggalan Palaeolithik di Sulawesi Selatan, yang kami pandang sebagai masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan penulisan Sejarah Nasional Indonesia. Artikel yang berjudul *"On the Dispersion of Homo Sapiens in Eastern Indonesia : The Palaeolithic of South Sulawesi"* tersebut kami pilih sebagai artikel utama pada edisi nomor ini. Dan dua tulisan lainnya tentang dinamika budaya masyarakat di era pasca modern merupakan lontaran gagasan yang patut anda simak. Yang satu melihatnya dari sudut pandang antropologi budaya, dan yang lainnya mencoba menghampirinya dengan pendekatan arkeologi. Edward L. Poelinggomang lalu melengkapinya dengan satu kajian khusus tentang benturan budaya di bandar-bandar pesisir Sulawesi Selatan. Potensi peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan juga anda dapat saksikan sebelum kami ajak untuk mengikuti liputan seputar kegiatan SPSP Sulselra pada halaman 51. Semuanya kami sajikan untuk anda. Terima kasih.

Redaksi

Isi

No.1 Th. I Maret 1996

1. **On the Dispersion of Homo Sapiens in Eastern Indonesia. The Palaeolithic of South Sulawesi** - Bahru Kallupa, Gert-Jan Barstra, Susan G. Keates, and Basoeki/hal.4
2. **Satu Alternatif Gagasan Untuk Mengungkap Nuansa Budaya di Era Pasca Modern** - Darmawan Mas'ud Rahman/hal.11
3. **Penelitian dan Pemikiran Arkeologi Dalam Era Pasca Modern** - Iwan Sumantri/hal.15
4. **Benturan Budaya di Bandar-bandar Pesisir Sulawesi Selatan** - Edward L. Poelinggomang/hal.22
5. **Erong Sebagai Salah Satu Peninggalan Tradisi Megalitik di Tana Toraja** - Albertinus/hal.28
6. **Beberapa Catatan tentang Situs Makam-makam Kuno di Sudiang** - Irwani Rasyid/hal.36
7. **Antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil** - Nikolaus/hal.41
8. **Memahami Alur Pemikiran Augustinus tentang Sejarah** - Muslimin A.R. Effendy - / Hal. 47
9. **Warta Suaka PSP** / hal.51

Keterangan Sampul :

Benteng Somba Opu berdasarkan peta rahasia VOC tahun 1638
(ilustrasi : Jamaluddin)

On the Dispersion of *Homo Sapiens* in Eastern Indonesia : The Paleolithic of South Sulawesi

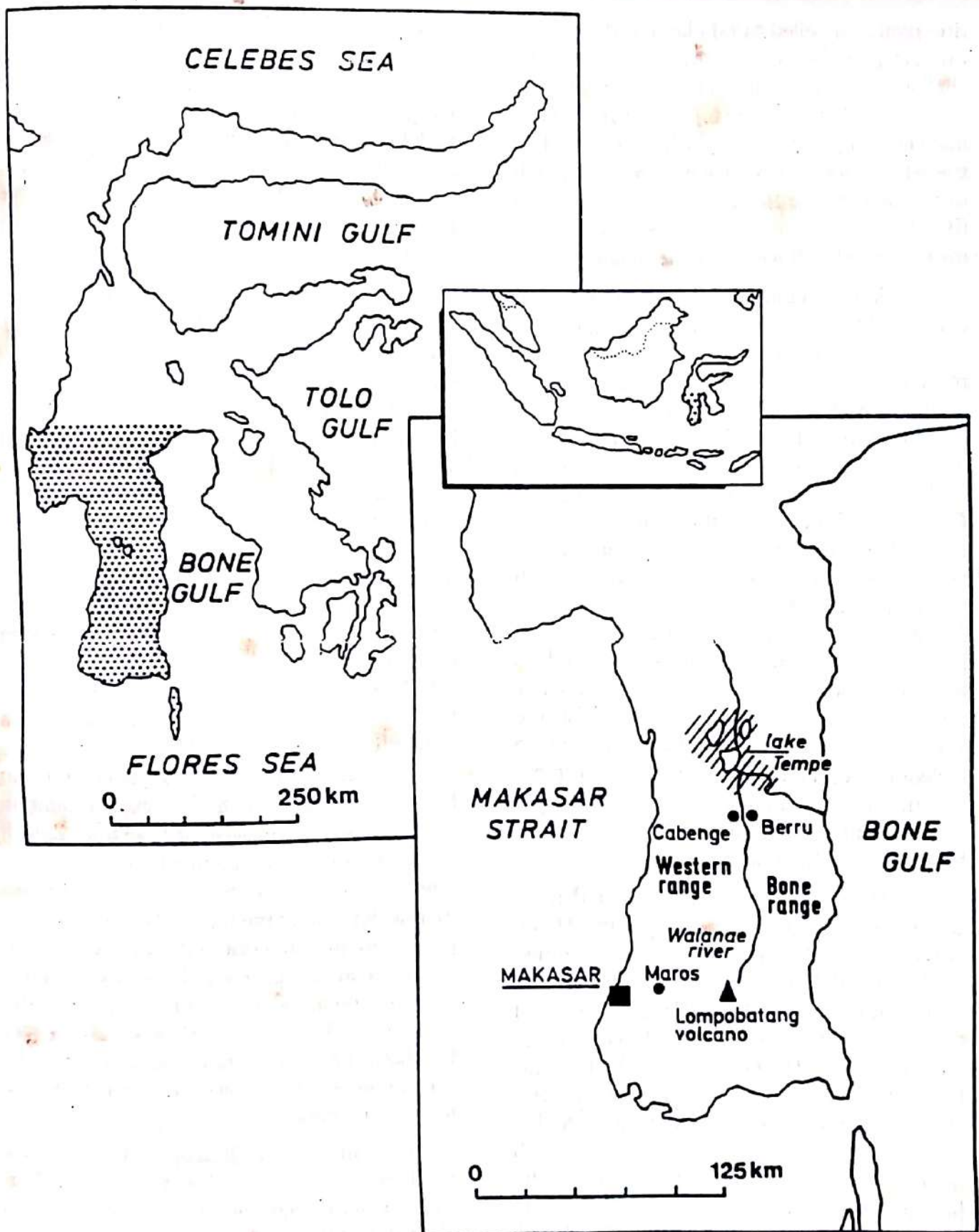
By : Bahru Kallupa, Gert-Jan Bartstra,
Susan G. Keates, and Basoeki

Thiel (CA 28-236-41) has proposed that the dispersion of *Homo sapiens* throughout eastern Indonesia and beyond, into Australia, during Upper Pleistocene times may be explained by migration during periods of high sea level, as reduction in land area increased pressure on existing food supplies and compelled people to search for new land. She suggests that probably nowhere in the eastern islands, which have always been separated from former Sundaland by deep straits, will there be any evidence of human occupation earlier than about 50.000 B.P., when there was a distinct rise in sea level. In our opinion, the earliest traces of human occupation in South Sulawesi may indeed date from around 50.000 B.P. *H. erectus* evidently never reached South Sulawesi, and the ancient stone implements that have been collected in the Walanae Valley during the past two decades must be attributed to *H. sapiens*. We think that Thiel has provided a very useful working hypothesis on the basis of which it will be possible to consider the evidence from other islands in the eastern Indonesian archipelago.

The four-armed island of Sulawesi extends across the equator from 2° N to 6° S. It is about 800 km long and 500 km at its widest point (fig.1). Its geology is rather complicated

because of its location between the Asian and Australian continents. During the Tertiary Sulawesi was a string of islands that gradually merged as a result of epeirogenetic movements, volcanic eruptions, and erosion of mountains the detritus of which was deposited in the littoral zones. In the Miocene and again in the Plio/ Pleistocene, the existing deposits were folded, and pronounced fault systems came into existence.

The terrestrial faunas of the western and the eastern Indonesian archipelago have long been recognized as distinct. In the middle of the last century the naturalist Wallace drew a line between Bali and Lombok and between Borneo and Sulawesi to indicate a barrier between an Asian fauna, with an abundance of mammals such as apes, monkeys, rhinoceroses, elephants, tapirs, etc., and an Australian fauna, with non-placental mammals such as marsupials and monotremes. Geologically, Wallace's Line seems well founded. The Strait of Makasar is nearly 3.000 m deep and was probably never narrower than 150 km during the Pleistocene. The Lombok Strait was still in existence, and accordingly it was assumed that terrestrial mammals could not have crossed Wallace's Line. The islands of Sumatra, Borneo, and Java are situated on the sub-ma-



Sulawesi (left) and its south arm, showing principal sites (right).

rine platform called Sunda-land, a direct continuation of the Asian mainland. When the shallow sea ran dry during Pleistocene periods of low sea level, Asian terrestrial mammals, including *H. erectus*, could have reached all the islands west of Wallace's Line, although other dispersal routes could be envisaged (Braches and Shutler 1984). Sulawesi, however, seemed to have been unattainable.

At the beginning of this century it became clear, however, that Wallace's Line was not to be regarded as an absolute barrier. As more information became available about the contemporary fauna of Sulawesi, it was recognized that more than 50 % of the vertebrates and invertebrates were of Asian origin. A land bridge must once have existed between South China, via Taiwan and the Philippines, and North Sulawesi. Wallace's Line came to be viewed as a vague boundary between a rich Oriental fauna in the west and an impoverished, unbalanced, endemic one on the eastern islands. Cave research on Sulawesi yielded no extinct species but many interesting endemic forms. Therefore, it came as surprise in the late 1940s when a true fossil vertebrata fauna including elephant remains was found there, and the question immediately arose whether early hominids in the form of *H. erectus* could have reached the island.

The vertebrata fossils discovered in the south arm of Sulawesi in the area south of Lake Tempe (fig.1). The first fragments were found in 1947 by H.R. van Heekeren, at that time a prehistorian with the Archaeological Service of the Dutch East Indies. The fossils were subsequently described by Hooijer (e.g., 1948). This fossil fauna has become known as the *Archidiskodon Celebochoerus* fauna and is characterized by curious endemic forms such as giant tortoises and dwarf elephants. The habitat of these species was clearly insular, and geological investigations confirm that South Sulawesi south of Lake Tempe was a separate

island during the Miocene and Pliocene and much of Pleistocene. It is unnecessary, however, to postulate land bridges to account for the arrival of the *Archidiskodon Celebochoerus* fauna in South Sulawesi as, for example, does Hooijer (1975); all of the species found could have reached the former island by swimming even the elephants (Sondaar 1981).

The Swiss naturalists Sarasin and Sarasin (1901) described thick deposits of clay, sand, and gravel in the broad Walanae Valley that they called "Celebes molasse". The Dutch mining engineers't Hoen and Ziegler (1917 [1915]) made this molasse part of the so called Walanae or Bone Formation, which outcrops at various places in the central part of the south arm in the form of cemented sandstones and conglomerates. Erosion of these exposures results in sheets of lag gravel that cover the slopes of the hills. It was in such gravels that the first vertebratebearing deposits have been examined in the field (Sjahroel 1970, Bartstra 1977, Sartono 1979). The Walanae Formation represents a regressive sequence with a distinct coarsening upwards that is suggestive of the gradual filling-up of a previous basin between the western and eastern mountain ranges of South Sulawesi, with sections revealing marine deposits at the base and subsequently exhibiting neritic through littoral to estuarine deposits at the top. Intercalated tuff deposits, pointing to contemporaneous volcanic activity, can be observed. The vertebrata fossils are to be found in the very top parts of the sections, and, as one would expect, the larger fossils (complete elephant skulls) occur in the sandstone and the smaller, stronger fragments in the conglomerates.

Sartono (1979) assign a Pliocene age to all the vertebrate fossils of the Walanae Formation, as do Hooijer (1982) and Groves (1985). We think that a Pleistocene age cannot be excluded for the specimens at the very

top, directly southwest and southeast of Lake Tempe. The shallowing of the basin would have been a long, intermittent process beginning in the Upper Miocene and continuing well into the Pleistocene, culminating in a final uplift of the area with subsequent subaerial erosion. Attempts at uranium series dating (in Groningen in 1987) of some of the fossil vertebrate fragments found *in situ* in the top part of the Walanae Formation (near Paroto) point to ages in excess of 350.000 years.

No remains of early hominids have ever been discovered amongst the numerous vertebrate fragments from South Sulawesi. Stone artifacts have been found, however, at precisely the same localities as the vertebrates.

The first artifacts from the Walanae Valley were found by Olivier, a Dutch agriculturalist, on August 2, 1947. Olivier mentioned these finds to van Heekeren, who subsequently managed to find more, mostly around the village of Berru on the right bank of the Walanae. Van Heekeren (1958) classified these artifacts as belonging to the Cabenge (formerly Tjabenge) industry, named for the nearest town.

Van Heekeren always thought that the fossil vertebrates of South Sulawesi and the artifacts of the Cabenge industry were of the same age. This explains to some extent the great enthusiasm with which he continued his research in the Walanae Valley during those politically turbulent that the fossil vertebrates were very old, and because tools and artifacts were found together there was the possibility that *h. erectus* has been the manufacturer. If remains of *h. erectus* could be found, they would represent its first occurrence in island Southeast Asia outside of Java.

Van Heekeren (1972) identified in the area around Berru a system of seven terraces, the oldest very eroded (recognizable in "kopjes") and the youngest taking the form of extensive clay deposits immediately bordering the river.

Although terraces definitely exist, however, on the basis of height alone no more than three or four can be recognized (Barstra 1977, Sartono 1979). The two highest, the 75 m and 50 m treads, are recognizable in extensive gravel sheets, a phenomenon that can also be observed in the terrace systems of the larger rivers of Java and is to be explained by the disappearance of the finer clastics at the higher levels as a result of erosion over a period of centuries. In many places, and typically in the Berru area, these terrace gravels have become mixed with lag gravels of the weathering conglomerates in the top part of the Walanae Formation. Since these conglomerates are fossil bearing, fragments of vertebrates appear in the lag gravels, in the mixed terrace/ lag gravels, and occasionally also in the terrace gravels proper (because at the time of the accumulation of the high terraces the river was eroding the Walanae Formation). Artifacts of the Cabenge industry can only be found in the terrace gravels and are therefore much younger than the fossil vertebrates. Although differences in the interpretation of the local section around Berru have been voiced by Sjaruel (1970), Bartsra (1977), and Sartono (1979), all three agree on the non-contemporaneity of the fossils and the artifacts.

Several attempts have been made to determine the age of the Cabenge artifacts more precisely, for instance, by assigning an age to the Walanae terraces. Sartono (1979) merely indicates a Pleistocene in particular. On geomorphological grounds we also favour an Upper Pleistocene age. A terrace system has developed on both sides of the Walanae along its middle course, and it can clearly be connected with the present drainage network. Part of this terrace system has been eroded away, but unconsolidated terrace fills are still preserved at high levels. In view of the rate of denudation these cannot be older than Upper Pleistocene at the most.

In 1970 three small excavations were carried out in the environs of Berru in remnants of the 75 m and 50 m terraces. Beneath the loose top gravels, finer clastics can sometimes be located in the form of streamlaid sands and clays. This whole sequence of local alluvium, unconformably overlying the Walanae Formation, is as thick as 2 m in some places. From this alluvium a few fragments of vertebrates have been collected, but, as we have said, these are probably derived from the Walanae Formation and are therefore of little use for relative dating (if indeed this were possible with an impoverished endemic fauna). Naturally, the possibility cannot be excluded that some fossil fragments are autochthonous, in which case they would be contemporary with the accumulation the *Archidiskodon Celebochoerus* fauna survived into the Upper Pleistocene, until the arrival of humans, but so far there is no evidence for this.

It must be emphasized that the excavations of 1970 did not provide any conclusive evidence that stone artifacts occur *in situ* in the high terrace gravels or finer clastics. Their distribution was not uniform, the finds appearing to be concentrated on the surface of the high westward protruding edges of the 75 m and 50 m levels. It looked as if people occupied and manufactured their implements on terrace treads already in existence, and this general impression has not basically changed as a result of reconnaissance trips and the digging of new test pits (albeit small ones) in the Berru area in 1978 and thereafter.

In a preliminary recapitulation of the 1978 fieldwork, the artifacts from the Walanae Valley were divided into three groups (assemblages). In making this classification it was assumed, on the basis of heavy patination and fluvial wear (which do not appear to be related to the raw material used), that the oldest group is in primary context in the terrace gravel, although again is in primary context in the ter-

race gravel, although again there is no direct evidence of this from the test pits (Bartstra 1978). In our opinion this postulated occurrence *in situ* is justified by the pronounced differences in rounding in the collection. The number of artifacts attributable to this first group is small, however. A second group actually does occur only on the surface and appears to fit the above-mentioned distribution pattern. A third group is associated with Post-Pleistocene "microlithic" sites that have no connection with the Walanae River terrace system.

Thus the first group of artifacts could be the same age as the gravels of the 75 m and 50 m levels. It would be of great interest if it should prove contemporaneous with one of the migration waves postulated by Thiel of *H. sapiens* across Wallace's Line during a period of distinct rise in sea level around 60.000 or 45.000 years B.P. There is still no substantial evidence for this, but it is interesting that the second group of artifacts is morphologically not unlike the Upper Pleistocene Leang Burung 2 cave industry, for which the oldest C¹⁴ determinations go back to ca. 30.000 B.P (Glover 1981 and personal communication).

The Cabenge artifacts can be roughly grouped as cores, flakes, and unifacial and bifacial pebble and cobble artifacts (so-called choppers and chopping-tools). Classification within the latter group is based on size and patterns of flake removal. A diameter smaller or larger than 64 mm may be regarded as a criterion for a distinction between pebble and cobble artifacts (with reference to the Wentworth [1922] scale). This categorization is devoid of specific functional interpretations (e.g., "chopper") and provides an opportunity to shape a more objective framework for lithic analysis (Keates and Barstra n.d.). The raw material for the Cabenge specimens derives from river gravels of many types (andesite, quartzite, chert, silicified tuff, and limestone). While the large artifacts were made of rela-

tively coarse-grained materials, the small ones were primarily made of fine-grained ones, and this appears to indicate selection of particular raw materials for different lithic classes. Conclusive functional identification of the Cabenge artifacts is hampered by natural wear and, to some extent, by the method of core reduction (direct hard hammer percussion), which makes clear identification of possible usewear problematic in a number of cases. The lack of subsistence evidence, for example, animal bones with cut-marks, in association with the specimens further complicates an assessment of palaeoeconomic behaviour in the Walanae Valley.

Judging from the distribution of small flake scars, however, some of the artifacts, particularly the flakes, may have been used as scraping and/or cutting tools.

To place the Cabenge industry in a wider archaeo-logical context we can examine the Maros limestone region, southwest of Cabenge, which has a good prehistoric record from the Upper Pleistocene well into the Holocene (Bellwood 1985). Three limestone caves that have been studied have a chronological though interrupted record from around 30.000 years B.P. to 20.000 years B.P. No significant change in stone artifact technology can be observed until about 7.000 years B.P., but a trend towards smaller tools has been noted (Presland 1980). Leang Burung 2 (ca. 31.000-ca. 19.000 years B.P), although the oldest, has not yielded any bifacial cobble artifacts (Glover 1981). This suggests that these types in the first group of the Cabenge industry together with the worn flakes may represent the earliest record of human occupation in South Sulawesi. Alternatively, of course, they may indicate different adaptive strategies in the Walanae Valley area.

Outside Sulawesi, the artifacts from Ngebung and Tapan (both within the dome of

Sangiran in Central Java) are very different from the Cabenge specimens. They date from the basal Upper Pleistocene and are probably the work of *H. erectus soloensis* (Bartstra 1990 [1989], Bartstra and Basoeki 1989). The only artifacts from Central Java that have been assigned to the second half of the Upper Pleistocene are those of the so called *Pacitanian* (Bartstra 1984), a genuine *technocomplex* with an abundance of pebble and cobble tools, mostly unifacial. Characteristic elements are the so-called hand-adzes and hand axes, although these latter differ from the classic *limande* concept in Western Europe. In the Cabenge industry there are also "hand-adzes" and "hand-axes"; while we do not favour a functional terminology for the Cabenge specimens, a morphological description may obscure their distinct correspondence with *Pacitanian* types.

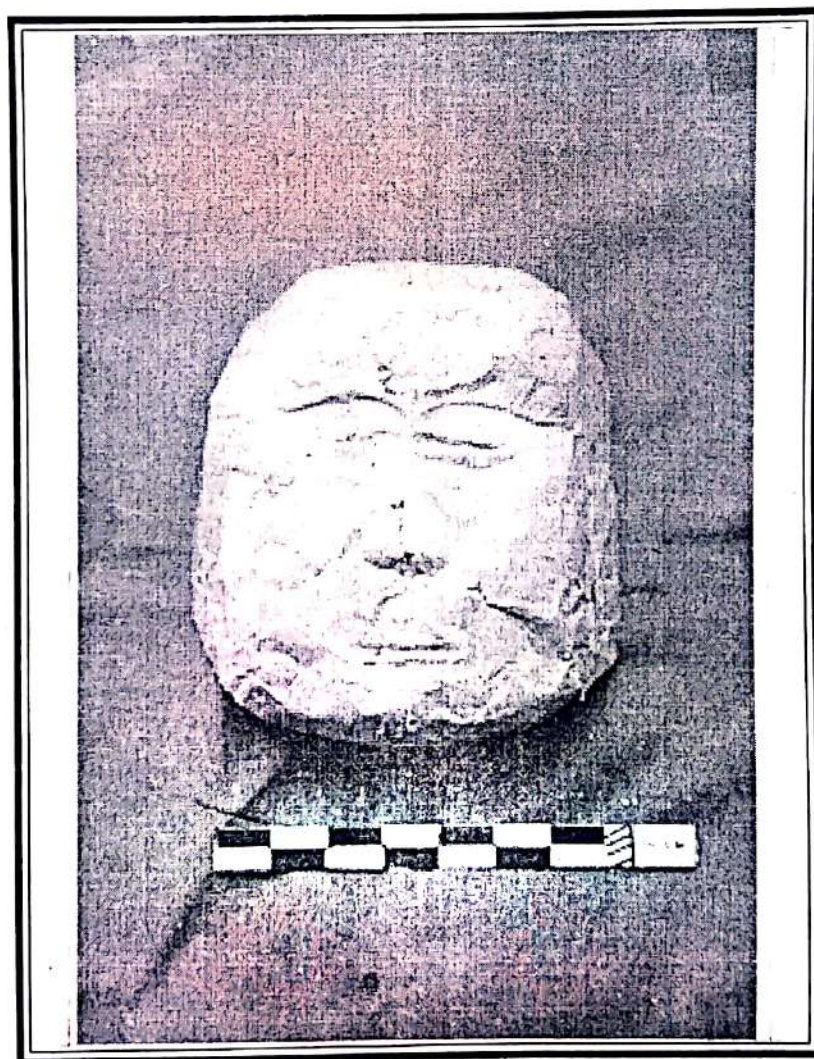
Summarizing, then, in our opinion the Cabenge industry of South Sulawesi is to be linked with the first waves of *H. sapiens* that crossed Wallace's Line in the second half of the Upper Pleistocene: the Cabengian and the *Pacitanian* are of the same family. ■

Dikutip dari *Current Anthropology*
Vol.32, No.3 June 1991 atas izin
penulisnya.

References Cite

- SJAHROEL, A.A. 1970. Report on the Preliminary Geological Survey of the Central part of Kabupaten Soppeng, South Celebes. MS, Direktorat Geologi Bandung.
- SONDAAR, P.Y. 1981. The *Geochelone* Faunas of the Indonesian Archipelago and Their Paleogeographical and Biostratigraphical Significance. Mod-

- THIEL, B. 1987. Early Settlement of the Philippines, Eastern Indonesia, and Australia-New Guinea: A New Hypothesis. *CURRENT ANTHROPOLOGY* 28:236-41.
- THOEN, C.W.A.P., and K.G.J. ZIEGLER. 1917 (1915). Verslag over de Resultaten van Geologisch Mijnbouwkundige Verkenningen en Opsporingen in Zuidwest-Celebes. *Jaarboek van het Mijnwezen in Neder-landsch Oost-Indie* 44:234-335.
- VAN HEEKEREN, H.R. 1958. The Tjabenge Flake Industry from South Celebes. *Asian Perspectives* 2:77-81.
- WENTWORTH, C.K. 1922. Scale of Grade and Class Terms for Elastic Sediments. *Journal of Geology* 30: 377-92.



Mask Material Gold, Suaka PSP Sulseira Collection

No.	Masalah Dasar Dalam Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
		1	2	3
1.	Manusia - Hidup	bu	ba	bu - ba
2.	Manusia - Karya	hi	ke	ka - ka
3.	Manusia - Waktu	la	se	de
4.	Manusia - Alam	tu	sel	ku
5.	Manusia - Manusia	kol	ver	In

Keterangan :

bu = buruk	la = lalu
ba = baik	se = sekarang
de = depan	sel = selaras
hi = hidup	tu = tunduk
in = individualis	ver = vertikal
ka = karya	
ke = kedudukan/kehormatan	
ku = kuasai	

II

Berbagai paradigma bermunculan dan terus berkembang, untuk menemukan kembali hakekat dari suatu bentuk kebudayaan. Menumbuhkan berbagai aliran dan teori yang lama kelamaan saling isi mengisi sesuai dengan visi pengamatan para pelopor dan pendukungnya.

Ada dua aliran yang bertahan dan saling berhubungan untuk keluar dari keadaan yang membingungkan tentang arti dan hakekat sebuah elemen budaya. Karena cepatnya perubahan itu, memunculkan sebuah aliran baru yang mewadahi keduanya sebagai sebuah paradigma baru. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aliran budaya materialisme

Landasan dan kerangka berfikirnya adalah gagasan Karl Marx yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya timbul karena ada pertentangan antar kelompok di dalamnya. Pertentangan itu muncul karena adanya kepentingan yang berlawanan antara kekuatan produksi dan relasi produksi. Kekuatan produksi adalah cara mengelola alam (tehnologi dan ekosistem), sedangkan relasi produksi adalah hubungan sosial dalam proses pengelolaan alam itu. Dengan kata lain bahwa aliran itu hampir selalu menjelaskan perubahan sosial akibat konflik kepentingan dan akibat

perkembangan tehnologi (techno environmen-
tal).

2. Aliran budaya idealis

Aliran itu menekankan bahwa perubahan kebudayaan dan masyarakat terjadi karena peran ideologi (mental) dan kognisi masyarakat dan pribadi dalam konteks sejarah sangat menentukan. Dan lahirnya bentuk bentuk kebudayaan kebanyakan dilontarkan di dalam berbagai simbol yang sarat makna.

3. Aliran Neo Marxisme

Aliran ini muncul sebagai hasil dari outokritik dari sebagian kelompok Marxis tradisional. Kelompok itu yakin bahwa ideologi tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi. Munculnya perubahan dalam sebuah kebudayaan, kedudukan ekonomi sama derajatnya sebagai penentu perubahan itu. Bahkan pada akhirnya kecenderungan teori lebih banyak berpendapat bahwa faktor ideologi lebih banyak berperan. Khususnya dikuatkan oleh adanya kognisi pribadi dan masyarakat serta dikaitkan dengan konteks sejarah dari perjalanan kehidupan manusia pendukungnya. Apalagi konflik secara terus menerus di masyarakat tidak mungkin terjadi sebab setiap konflik selalu diikuti oleh integrasi. Orientasi respon selalu seimbang dengan orientasi stimuli pada diri manusia dengan menumbuhkan berbagai pola pikir dan pola tingkah laku yang tidak keseluruhannya

tergantung kepada teknologi dan ekosistem. Di sini tampak peranan mental manusia untuk menumbuhkan berbagai aspek kebudayaan. Khususnya terlihat pada wujud kebudayaan berupa sistem nilai budaya, sistem sosial, dan sistem teknologi yang menghasilkan benda budaya yang sarat akan makna dan nilai, sebagai induknya terkait dengan perubahan orientasi manusia karena situasi, ruang dan waktu.

Masa keguncangan dari berbagai kejadian sebelumnya timbul karena adanya orientasi yang oleh para pakar disebut sebagai "masa chaos teori". Masa itu mempunyai tanda-tanda zaman yang bersifat postmodern, postparadigm, post-structural, post Marxis dan lain sebagainya. Masa itu juga disebut sebagai masa krisis representasi (*A crisis of representation*).

Keadaan tersebut membawa hikmah tersendiri bagi budaya dan bentuk budaya di luar wilayah Ero-Amerika. Padahal masa sebelumnya yang disebut masa klasik (tahun 1920 s/d 1960-an) semua model dan teori budaya dikuasai oleh teori Barat yang berat sebelah. Masa itu juga dikenal dengan masa penjajahan teori budaya yang tetap mengacu pada pandangan faham evolusionisme yang dipelopori oleh L.H. Morgan dan E.B. Tylor sekitar tahun 1880-an.

Peralihan cara pandang di masa krisis representasi itu mengubur cara pandang aliran klasik atau tradisional. Oleh Geertz menyebutnya teori di belakang meja (*armchair theory*) yang sudah tidak berguna lagi.

Paradigma yang baru muncul itu ditandai oleh adanya pengamatan pada budaya secara empirik yang tampak pada elemen budaya keseharian, khususnya elemen "cultural force". Seperti kata Geertz : *if you want to understand what a science is, you should look in the first intance not at its theories or its findings, and certainly no at what its*

apologits say about it; you should look at what the pratitioners of it do dengan tumbuh dan berkembangnya pendekatan etnografi baru (*New ethnography*). Sasaran utama dari pendekatan itu adalah munculnya atmosfir baru yang memberi peluang dan kesempatan dirinya baik bagi rakyat untuk menyuarakan dirinya atas namanya sendiri dalam perbincangan antropologi.

Teori dari orang orang post-modernist itu, mengklaim bahwa semua suara dan pendapat dari manapun datangnya di atas bumi ini adalah sama pentingnya. Dan, interpretasi terhadap semua bentuk kebudayaan dari manapun dan di manapun adanya adalah berharga dan sederajat, sehingga pandangan realativisme budaya yang mengacu kepada bagaimana apresiasi budaya orang yang mendukung budaya itu, merupakan suatu loncatan penghargaan sangat berarti bagi budaya-budaya lokal non Barat.

Bila kita berbicara secara khusus di bidang arkeologi maka keadaan tersebut juga terasa di tahun 1970-an. Pada masa itu ada dua paradigma yang menonjol yaitu paradigma sejarah budaya dan paradigma proses budaya. Juga disebut arkeologi tradisional dan arkeologi pembaharuan. Arkeologi pembaharuan akhirnya banyak menarik minat dan mengikutinya karena pendekatan adaptif dari berbagai kesamaan aspek tinggalan, mendapatkan dan menerapkan berbagai dalil dan model untuk menjelaskan proses itu secara luas. Di samping itu pula pendekatan kuantitatif diterapkan secara luas diiringi penalaran deduktif terus diberlakukan. Dan bahkan aliran itu menjadi materialistik dan juga fungsionalistik. Hasil dari aliran itu kelihatannya menghiraukan berbagai potensi rohaniah dari manusia yang mendukung kebudayaan tertentu. Aliran yang muncul kemudian mencoba menggambarkan suatu proses kebudayaan yang didukung oleh manusia pendukungnya, di mana dilihat bahwa

aliran budaya idealisme muncul kembali di atas panggung teori.

Di samping itu menarik untuk dikemukakan munculnya aliran arkeologi teori kritis yang merupakan penggabungan antara Marxisme dan gagasan idealisme yang banyak menarik minat bagi arkeolog muda dan menandingi aliran arkeologi pembaharuan. Aliran ini kembali kepada kekhususan nilai budaya dari benda budaya setempat berdasarkan pada kekhususan sejarah. Dan munculnya arkeologi kontekstual atau arkeologi interpretif justru benar, benar kembali lagi kepada berbagai keterkaitan pandangan idealisme kombinasi antara pandangan materialisme dan idealisme yang ditopang oleh multidisiplin secara holistik. Maka pengungkapan sebuah aspek budaya dapat terlihat secara tuntas. ■

Prof.Dr. Darmawan Mas'ud Rahman,
M.Sc., mantan Kepala Suaka PSP
Sulselra, kini Kepala Balai Arkeologi dan
Guru Besar IKIP Ujung Pandang.

BIBLIOGRAPHY

Clifford, James and George E. Marcus (ed) 1986
Writing Culture, University of California
Press, Barkeley.

Fox, Richard G (ed), 1991 *Recapturing Anthro-
pology*, School of American Research
Press, Santa Fee, New Mexico.

Tanudirjo, Daud Aris, 1993 *Arkeologi Indone-
sia Masa Depan : Unilinierisme atau
Multilinearisme ?* EHPA, Puslit Arkenas,
Yogyakarta.

Clarke, Davi L. 1972 *Models and Paradigma in
Contemporary Archaeology*. Dalam *Models
in Archaeology*, ed. David - Clarke. Lon-
don : Methuen, hal. 1-60.

Bahn, Paul and Colin Renfrew, 1991 *Archaeol-
ogy : Theories, Methods and Practice*,
London : Themes and Hudson.

Benda Cagar Budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 1 (1) UU No. 5 Th. 1995 tentang BCB

Penelitian dan Pemikiran Arkeologi Dalam Era Pasca Modern

Oleh : Iwan Sumantri

"Archaeologists dig up Indian bones and study old things to make money." This is an eight year old boy's answer to the question; "What do archaeologists do, and why?". Yet it is no so different from answers given to the same question by a large portion of the lay public. On the other hand, an eleven-year-old answers with; "They study early man, his habits, weapons, and goods, to find out what we originated from." (Deetz, 1967 : x)

Narasi di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 1960-an di Amerika masih terdapat anggapan bahwa pekerjaan arkeologi hanya meliputi hal-hal yang bersifat kepurbakalaan semata. Di samping itu, narasi tersebut juga menunjukkan bahwa anggapan yang demikian terhadap arkeologi muncul dari kaum awam.

Di Indonesia, anggapan seperti itu sering kita dengar bahkan masih dapat kita jumpai pada tingkat pendidikan tinggi yang tidak begitu terlibat dalam pergulatan pemikiran keilmuan. Padahal arkeologi dewasa ini dalam sejarah perkembangan sudah melalui tahapan pemikiran yang begitu panjang dan dalam, serta begitu banyak perdebatan ilmiah.

Fenomena yang paling menarik dalam kerangka pengamatan terhadap perkembangan pemikiran arkeologi adalah lahirnya *The New Archaeology* sebagai akibat dari filsafat positivisme. Tetapi kemudian, ternyata arkeologi yang demikian menjadi tidak memuaskan lagi sebagai akibat mulai berkembangnya kembali filsafat idealisme. Idealisme yang berpengaruh pada arkeologi akhir-

akhir ini mungkin masih menjadi fenomena pemikiran, sehingga pada bagian tulisan yang mengetengahkan arkeologi yang mendapat pengaruh idealisme, tidak diberikan contoh penelitiannya.

Sekali Lagi : Sedikit Tentang Sejarah Perkembangan Arkeologi

Sejarah arkeologi menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi begitu banyak dan besarnya pergulatan pemikiran di dalamnya. Terutama ini terjadi di Amerika, yang hingga tahun 1980-an masih dijadikan sebagai kiblat pengetahuan arkeologi.

Soblof dan Willey (1981) yang mengamati sejarah perkembangan arkeologi di Amerika melihat adanya beberapa periode yang didasari atas perspektif teori, metode, dan strategi penelitian yang dilakukan oleh ahli arkeologi Amerika. Tentu saja pengamatan atas pembabakan tersebut berdasarkan pengamatan sintesisnya mereka sendiri.

Demikianlah, Soblof dan Willey memulai pembabakan tersebut dengan apa yang mereka sebut sebagai antiquarianism yang berlangsung hampir empat abad, yaitu dimulai pada sekitar abad XV hingga abad XIX. Periode ini lahir di Eropa sebagai akibat pengaruh *renaissance* Italia, yang dalam aktivitasnya ditujukan pada pencarian dan penemuan peninggalan purbakala yang dianggap monumental. Kegiatan yang demikian berpandangan komparatif terhadap aneka warna kebudayaan di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan kemudian

menunjukkan bahwa ternyata pandangan seperti ini menjadi inti dalam studi arkeologi dan antropologi.

Masih dalam konteks antiquarianism yang spekulatif ini, kemudian berkembanglah konsep tentang perbedaan kebudayaan yang menganggap perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan waktu dan perbedaan ruang geografik. Spekulasi dalam kesimpulan hasil penyelidikan kepurbakalaan pada masa ini disebabkan antara lain karena kurangnya data yang tersedia, pengaruh pendekatan teologi dan kesusasteraan, masih tingginya rasa kekaguman terhadap benda-benda eksotik, dan adanya konjektur yang tidak ilmiah.

Dari pandangan antiquarian tadi kemudian muncul pemikiran yang lebih sistematik yang diwujudkan dalam bentuk konsep klasifikasi *the three age system* yang mula-mula diperkenalkan oleh Thomsen. Konsep ini kemudian dianggap sebagai landasan bagi perkembangan arkeologi abad XX. Penggarapan arkeologi masa ini terutama ditujukan pada usaha untuk mendiskripsikan dan menetapkan klasifikasi terhadap benda arkeologi, terutama arsitektur dan bangunan. Kemudian, arkeologi mulai diajarkan pada universitas-universitas terkemuka di Eropa, yang memungkinkan lahirnya generasi arkeologi yang terlatih, terampil, yang kemudian menjadi aktif pada awal abad XX.

Sekitar awal hingga pertengahan tahun 1900-an arkeologi berkembang dengan pemusatan perhatian pada penerapan teori Deposisi Stratigrafiknya Lyell dan Teori Evolusi Biologi dari Darwin. Teori Evolusi yang dipopulerkan kemudian oleh Darwin inilah yang kemudian berpengaruh besar pada Teori Evolusi Budaya yang dipelopori oleh Taylor dan teori Evolusi Budaya yang dipelopori oleh Morgan. Ketika kegiatan industrialisasi di Eropa dan Amerika mulai berkembang, berkembang

pula apresiasi terhadap arkeologi. Masa ini kemudian disebut sebagai masa Klasifikasi historikal yang bertujuan untuk menemukan kronologi. Kegiatan arkeologi lapangan pada masa ini mulai diselenggarakan dalam jangka waktu yang panjang dan berlangsung baik di Eropa, Timur Tengah maupun di daerah Maya (Amerika). Begitulah ekskavasi yang dilakukan pada daerah-daerah tersebut mempunyai bobot pro-fesional yang dikerjakan oleh arkeolog - arkeolog yang profesional pula.

Sintesis sejarah kemudian ikut berpengaruh dalam arkeologi pada masa ini. Ini dapat dilihat dari kajian-kajian yang muncul yang penekanannya pada dimensi bentuk waktu dan wilayah kompleks budaya yang bertujuan untuk menyusun *sejarah kebudayaan*.

Di Amerika ada saat yang sama terjadi aliansi antara arkeologi dengan etnologi. Hasil aliansinya adalah lahirnya strategi penelitian yang disebut *direct-historical approach*. Pendekatan ini dapat disederhanakan dengan : bekerja mundur dari kajian atas kebudayaan yang mempunyai dokumen sejarah ke dalam masa prasejarah (Mundarjito, 1993).

Upaya untuk mencari jejak dari difusi budaya yang pernah terjadi, dan hubungan dimensi ruang waktu dari bentuk-bentuk budaya dalam wilayah-wilayah budaya dikembangkan pada sekitar tahun 1940 - 1960-an. Masa ini kemudian dinamakan *masa Klasifikasi-historikal* yang menitik-beratkan perhatiannya pada persoalan konteks dan fungsi. Tiga wujud pendekatan utama (yang kemudian disebut sebagai pendekatan ekologi budaya). *Pertama*; artefak seharusnya dipahami sebagai benda materi dalam sistem perilaku budaya masyarakat, sehingga perhatian para arkeolog seharusnya juga memusatkan diri pada kajian terhadap konteks arkeologi untuk mencapai kesimpulan fungsional. *Kedua* ; bahwa pola pemukiman merupakan kunci yang penting

untuk memahami adaptasi sosio-ekonomik dan organisasi politik. Dan bahwa cara manusia mengatur hidupnya dipermukaan bumi ini berkaitan dengan bentuk alam dan dengan komunitas lain. Dan yang ketiga ; bahwa hubungan antara kebudayaan dan lingkungan alam adalah penting, dan ini berarti mengikutsertakan manusia ke dalam aspek sumberdaya alam. Pendekatan ini kemudian dianggap kurang lengkap jika dibandingkan dengan pendekatan ekosistem yang muncul kemudian. Dalam kajian konteks dan fungsi, penggunaan metode dan konsep ilmu-ilmu sains dianggap sebagai metode yang paling tepat. Penemuan metode pertanggalan C-14 oleh Willard Libby pada tahun 1949 dirasakan sebagai penemuan yang amat penting dalam masa ini. Dalam tahun 1950-an terdapat ketidakpuasan dalam menarik kesimpulan dari penelitian arkeologi yang dilakukan. Ketidakpuasan itu terutama ditujukan pada cara arkeolog menerangkan hasil penelitian yang tidak pernah menerangkan sesuatu, dan hanya mengaitkannya dengan (misalnya) konsep migrasi manusia dan mengenai pengaruh-pengaruh budaya yang diperkirakan.

Tahun 1960-an kembali muncul konsep evolusi yang pernah hadir meramaikan khasanah arkeologi, setelah sekian lama dirasakan kurang sesuai. Mulai timbul perhatian terhadap teori sistem dalam arkeologi, konsep ekosistem, teknik statistik, dan sistem termodinamik (Hedder, 1991 : 156-157; Bahn dan Renfrew, 1991 : 411-412) serta peranan komputer. Penalaran deduktif dan filsafat ilmu pengetahuan positivisme (yang mengemuka ketika itu) mulai coba diadopsi. Oleh karenanya pemikiran yang demikian (yang kemudian berkembang dalam arkeologi) cenderung menjadi materialistik dan sekaligus fungsionalistik.

Berdasar itu semua, muncullah suatu gerakan ilmiah baru dalam arkeologi yang dipe-

lopori oleh arkeolog muda, yang dikenal dengan nama *New Archaeology* yang biasa juga disebut *The Modern Archaeology*, atau *Processual Archaeology* untuk membedakannya dengan arkeologi tradisional yang paradigmanya adalah sejarah budaya. Oleh karena arkeolog muda tadi dilatih oleh ahli-ahli antropologi sosial, maka penekanan perhatiannya adalah pada *penggambaran proses budaya*. Pada umumnya pembaharu dalam arkeologi ini memiliki rasa optimisme yang besar terhadap kemungkinan berhasilnya eksplanasi prosesual, dan tercapainya hukum dinamika budaya. Mereka juga menganggap bahwa arkeologi harus juga relevan dengan permasalahan dunia masa kini. Masa pergolakan ini biasa juga dikenal sebagai awal masa eksplanasi.

Sikap dasar di atas mencerminkan pandangan mereka terhadap pendekatan yang melatarinya. Paling kurang ada tiga hal yang melatarinya. Yang pertama adalah pendekatan yang evolusioner atau yang mempunyai perspektif sejarah. Kedua; berasal dari teori *general sistem* dengan pandangan sistemik dari kebudayaan dan masyarakat. Ketiga; penerapan penalaran deduktif.

Pendekatan evolusioner memungkinkan timbulnya anggapan bahwa aspek tehn-ekonomik dan kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling utama di dalam perubahan, sedangkan faktor sosial dan ideologi datang kemudian.

Arkeologi Tradisional versus Arkeologi Modern.

Secara sederhana jika dibanding-bandingkan antara arkeologi tradisional dengan arkeologi modern dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Hakekat arkeologi. Arkeologi Tradisional (AT); memberikan dan

merekonstruksi sejarah dan berbagai aspek kehidupan masa lampau. Arkeologi Modern (AM); menjelaskan perubahan budaya di masa lampau.

Cara eksplanasi. AT; Sejarah Budaya, menjelaskan berdasarkan tahap-tahap perkembangan budaya yang bersifat partikularistik. AM; Proses Budaya, menjelaskan bagaimana proses perubahan budaya berlangsung dengan generalisasi.

Penalaran. AT; Induktif; melihat data arkeologi serpihan yang harus disatukan menjadi rekonstruksi yang utuh. AM; Deduktif; bergerak dari penyusunan hipotesis, bentuk model, dan pengujian pada data.

Kesahihan. AT; tergantung otoritas. AM; tergantung hasil pengujian hipotesis.

Pendekatan. AT; Kualitatif. AM; Kuantitatif.

Pusat Perhatian Penelitian. AT; Pengumpulan data; menimbun data untuk menambah informasi. AM; berkiblat masalah; mencari data yang sesuai dengan syarat pengujian.

Pandangan. AT; Pesimistik; data arkeologi tidak akan mampu untuk merekonstruksi organisasi sosial atau sistem pengetahuan. AM; Optimistik; selalu mencoba memberikan penjelasan, walaupun sadar akan kesulitannya.

Sikap. AT; Menyendiri (isolasionist). AM; Membuka diri pada ilmu lain.

Cara Pengungkapan. AT; Uraian kalimat dan narasi. AM; Pelambangan dan jargon. (Bahan and Renfrew, 1931:35; Clark, 1972:35).

Berdasarkan ciri dari masing-masing di atas, sebenarnya arkeologi tradisional cenderung menjelaskan tinggalan arkeologi sebagai bagian dari peristiwa sejarah tertentu dengan menempatkannya dalam kerangka

ruang dan waktu yang tertentu pula. Seolah tinggalan arkeologi itu merupakan hasil budaya suatu kelompok etnis yang tinggal pada masa tertentu. Arkeologi modern sebaliknya lebih menekankan penjelasannya pada kerangka pikir adaptif, yaitu suatu anggapan bahwa kesamaan tinggalan arkeologi dipandang sebagai hasil proses adaptasi manusia terhadap lingkungan atau tantangan yang sama.

Kritik terhadap Arkeologi Pembaharuan dan lahirnya Arkeologi Pasca-Moderen.

Kurang lebih 20 tahun kelahiran paradigma baru di dalam arkeologi, muncul kritik-kritik terhadap arkeologi pembaharuan modern, yang seterusnya melahirkan istilah *postprocessual archaeology*. Dalam gerakan pasca Arkeologi Pembaharuan antara lain terdapat *arkeologi struktural*, *arkeologi Marxist dan Neomarkist*, *arkeologi Teori Kritis*, *arkeologi kontekstual/interpretatif*, dan *arkeologi prosesusual-kognitif*.

Berikut dijelaskan secara singkat tiga di antara lima pasca Arkeologi Pembaharuan di atas.

Arkeologi Struktural

Arkeologi struktural berkembang berdasarkan pemikiran strukturalisme yang dikembangkan antara lain oleh Levi Strause (Tanudirjo, 1993 : 3). Intinya, mereka yakin bahwa tindakan manusia itu dikendalikan dan dipandu oleh pikiran mereka. Aliran ini melihat budaya sebagai suatu bangun (struktur) perlambangan yang dianut oleh sekelompok manusia sebagai hasil dari akumulasi gagasan mereka. Tujuan kajian yang bersifat struktural adalah menemukan prinsip dasar pikiran manusia yang terungkap lewat berbagai aspek budaya (Thomas, 1989:122). Kerangka pikir yang demikian bersifat idealistik, dan merupakan suatu kritik terhadap Arkeologi Pembaharuan yang bersifat materialistik.

Menurut aliran ini, tinggalan arkeologi dapat mencerminkan struktur gagasan yang ada dalam pikiran manusia dan masyarakat yang menghasilkannya. Kajian arkeologi yang demikian dapat dicontohkan di sini adalah Dorothy K. Washburn, Andre Leroi Gourhan, dan Dean Arnold, Washburn yang meneliti tembikar misalnya, melihat adanya hubungan yang erat antara motif hias tembikar dengan struktur sosial masyarakatnya. Indikasinya terlihat dari pola susunan motif itu pada bidang-bidang tembikar. Oleh karenanya, susunan motif hias tembikar tertentu dapat dipakai untuk melakukan pengelompokan-pengelompokan sosial (Hodder, 1991a : 37). Sedangkan Leroi Gourhan yang meneliti lukisan dinding gua di Perancis mencoba untuk menunjukkan adanya hubungan tertentu antara gambar binatang yang dilukiskan dengan pembagian ruang-ruang di dalam gua. Gambar kuda dan bison mendominasi dinding gua ruang utama, sedang gambar kijang, ibex, dan mamoyah hampir selalu menempati pinggiran gua, dan gambar beruang, badak dan sejenis kucing (feline) dilukis di bagian-bagian terdalam gua. Pola ini menurutnya menunjukkan struktur gagasan manusia penciptanya (Bahn dan Renfrew, 1991 : 345), Arnold membuktikan struktur atau susunan hiasan tembikar perajin tembikar di Quihua (Peru) mencerminkan bahwa gagasan-gagasan masyarakatnya dalam mengatur dan memanfaatkan ruang sosial dan lingkungan mereka (Hodder, 1991a : 43-44, Bahn dan Renfrew, 1991: 427).

Sebenarnya, kerangka pikir yang digunakan seperti di atas masih cukup dekat dengan Arkeologi Pembaharuan, yakni masih berkisar pada pola pikir sistemik dan adaptif. Tetapi menurut Hodder (1991a ; 49) kerangka pikir yang demikian tidak memberi ruang pada kemungkinan gagasan individu yang ikut berperan dalam menentukan bentuk suatu budaya.

Arkeologi Marxist dan Neo-Marxist

Sesuai dengan namanya, arkeologi ini dilandasi kerangka pikir dengan gagasan Karl Marx yang menyatakan bahwa perubahan dalam masyarakat pada hakekatnya disebabkan oleh pertentangan kelas. Pertentangan itu sendiri muncul karena perbedaan ke-pentingan antara kelas serta pertentangan antara kekuatan produksi (*Force of Production*) dan relasi produksi (*relation of production*). Kekuatan produksi adalah cara mengolah alam, termasuk di dalamnya teknologi dan ekosistem, sedangkan relasi produksi adalah hubungan sosial dalam proses pengolahan alam tadi (Hodder, 1991a:60-62; Tanudirjo, 1993:4). Karenanya, penganut Arkeologi Marxist biasanya menjelaskan perubahan sosial sebagai akibat konflik kepentingan dan akibat perkembangan teknologi. Berikut ringkasan dari pokok Arkeologi Marxist menurut Bahn dan Renfrew (1991:414) :

1. Evolusionistik; mencari penjelasan tentang proses perubahan dengan prinsip-prinsip umum.
2. Materialistik; titik tolak pembicaraan adalah realitas kehadiran manusia yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok (fisik) manusia.
3. Holistik, mempunyai pandangan yang jelas tentang tata kerja dan sistem masyarakat dan memperhatikan jalinan antara keseluruhan sistem dengan bagian-bagiannya.
4. Meyakini adanya berbagai tipe masyarakat yang dapat dibeda-bedakan menurut cara bagai-mana mereka mencukupi kehidupan mereka.
5. Memandang perubahan dalam masyarakat selalu terjadi sebagai akibat pertentangan kelas dan kepentingan di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini,

Arkeologi Marxist berbeda dengan New Archaeology yang fungsionalistik yang melihat perubahan sebagai upaya melakukan efisiensi.

6. Mempunyai anggapan bahwa ideologi (kepercayaan dan pengetahuan, atau disebut *superstructure*) ditentukan oleh cara pemenuhan hidup (*infrastructure*) masyarakatnya. Jika ekonomi berkembang, maka kepercayaan / pengetahuan juga berkembang dalam suatu hubungan yang sistematis.

Arkeologi Marxist ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Arkeologi Pembaharuan, karena pandangannya sistemik dan materialistik. Autokritik terhadap kerangka pikir Arkeologi Marxist kemudian muncul dengan suatu keyakinan bahwa ideologi dan ekonomi mempunyai kedudukan yang sama dalam proses perubahan budaya, yang berarti tidak ada yang lebih dominan ataupun inferior. Keduanya mempunyai kemampuan yang sama sebagai faktor penyebab perubahan kebudayaan (Bahn dan Renfrew, 1991 :430; Trigger, 1989:430-434).

Arkeologi Kontekstual : Arkeologi Pasca Modern.

Tokoh *post-processual* yang sejak semula mengkritik arkeologi prosedural adalah Ian Hodder. Ia yakin bahwa penjelasan-penjelasan yang sistemik, adaptif, dan materialistik tidak akan mampu menembus dimensi-dimensi budaya lain, terutama yang bersifat idealistik dan simbolik. Gagasan yang dia lontarkan secara konsisten adalah penekanan pada pribadi atau individu yang aktif dalam sistem budaya. Menurutnya, individu adalah pencipta dan pelaku budaya, sehingga besar kemungkinan individu sebagai agen penyebab variasi budaya (Hodder, 1991a; 1991b; 1991c). Selain penekanan perhatian terhadap peranan individu, Hodder juga menganjurkan

meletakkan suatu fenomena budaya dalam kerangka sejarah. Anjurannya yang lain adalah tentang perlunya penafsiran suatu fenomena arkeologi dalam konteks yang lebih luas, baik itu konteks yang berkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan tindakan maupun konteks yang terkandung dalam benda itu sebagai satu "teks" atau wacana. Suatu wacana hanya dapat dibaca dengan benar jika kita mampu memahami "bahasanya" (Tanudirjo, 1993:5). Oleh karenanya sangat perlu pemahaman tentang "arti" (meaning) sesuatu aspek budaya secara internal atau emik.

Gagasan Hodder ini memunculkan pendekatan etik dan emik di dalam arkeologi. Untuk menjembatani kedua sudut pandang itu dilakukan pendekatan empatetik yang pada dasarnya ber-anggapan bahwa tindakan manusia dan budaya bendawi yang dihasilkan oleh suatu budaya tidak selalu bersifat partikularistik, tetapi juga mempunyai unsur-unsur yang sama. Cara penjelasan yang dianjurkan adalah peneliti

mencoba menempatkan diri sebagai bagian dalam budaya itu. Dengan, demikian diharapkan peneliti akan mampu memahami "arti" suatu fenomena budaya dalam konteks aslinya (yang bersifat khusus/ partikular), dan sekaligus ber-sifat kritis dan dapat menjelaskan fenomena tadi dalam suatu kerangka pikir yang lebih luas (generalisasi). Pendekatan seperti itu diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih realistik tentang fenomena yang dijelaskan (Melas, 1991).

Sebenarnya Hodder tidak begitu menyalahkan Arkeologi Pembaharuan. Ia masih yakin bahwa penjelasan materialistik, sistemik, dan kaya teori dari Arkeologi Pembaharuan tidak salah. Cuma agaknya Hodder menganggap bahwa penjelasan-penjelasan dari Arkeologi Pembaharuan itu berlebihan, sehingga mengabaikan peran individu, aspek ideologis, simbol, histori, dan

gagasan internal. Karena itu pulalah sehingga dia kemudian juga menyarankan penggunaan cara interpretasi hermeneutik untuk menjelaskan masa lalu. Dengan demikian arkeologi ditempatkan sebagai penerjemah antara masa lalu, dan antara khusus dengan umum. Nampaknya Hodder menginginkan arkeologi mau mendengar, memahami, dan menampung berbagai "suara-suara" daripada menerapkan suatu tolok ukur yang universal, sehingga dengan demikian arkeologi dapat menghadirkan masa lalu di tengah keragaman budaya masa sekarang. ■

Drs. Iwan Sumantri, Dosen Fakultas Sastra Unhas, kini sedang menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sumber Bacaan

Bahn, Paul and Colin Renfrew, 1991 *Archaeology : Theories, Methods and Practice*, London : Themes and Hudson.

Clarke, David L. 1972 *Models and Paradigma in Contemporary Archaeology*. Dalam *Models in Archaeology*, ed. David - Clarke. London : Methuen, hal. 1-60.

Deetz, James, 1960 *Invitation to Archaeology*, New York : The Natural History Press.

Hodder, Jan, 1991a *Reading the Past*, (second edition). Canbridge : Canbridge University Press.

1991b Post-modernisme, Post-strukturalisme, and Post-Processual Archaeology. Dalam *The Meaning of Things*. Ed. Ian Hodder, London; Harpercollina.

1991c Interpretive Archaeology and Its Role, dalam *American Antiquity* vol.56 (1) January 1991, hal.7-18.

Melas, EM, 1991 *tic, Emics and Emphaty in Archaeological Theory*. Dalam *The Meaning of Things*. Ed. Ian Hodder, hal. 137-155.

Mundarjito, 1993 *Kecenderungan Penelitian Arkeologi Mutakhir*. IFSA:1993.

Tanudirjo, Daud Aris, 1993 *Arkeologi Indonesia Masa Depan: Unilinearisme Atau Multilinearisme*. Dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Thomas, David Hurst, 1989 *Archaeology* (second edition). Forth Worth: Holt, Rinehart and Watson.

Trigger, Bruce, 1989 *A History of Archaeological Thought*. Canbridge: Canbridge University Press.

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata bertentangan dengan upaya perlindungan BCB semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan

Pasal 20, 19 (2,a,b) UU No. 5 Th. 1992 tentang BCB

Benturan Budaya di Bandar-bandar Pesisir Sulawesi Selatan

Oleh : Edward L. Poelinggomong

Philip D. Curtin menyatakan bahwa perdagangan dan pertukaran lintas budaya telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah kemanusiaan, bahkan merupakan stimuli eksternal yang sangat penting bagi perubahan, disamping meninggalkan pengaruh yang kurang menguntungkan sehubungan dengan penaklukan militer (Curtin, 1984 : 1). Stimuli eksternal bahkan sering dipandang sebagai sumber utama perubahan dan perkembangan yang sangat penting dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seyogianya perubahan dan perkembangan itu ditentukan juga oleh faktor dorongan internal. Sebagai contoh dapat diajukan bahasa penulisan makalah ini yang kita sebut Bahasa Indonesia yang berakar dari Bahasa Melayu dan diperkaya perbendaharaan kata-katanya dari bahasa daerah lokal dan bahasa asing walaupun alfabet yang digunakan adalah yang berasal dari orang Phunisia dan halaman penomorannya berangka Arab.

Pendapat ini mengawali munculnya sejumlah konsep dalam mengkaji kehidupan masyarakat, di antaranya yang ingin saya perbincangkan dalam hubungan dengan topik ini adalah "jaringan perdagangan" (*trade network*) dan "diaspora perdagangan" (*trade diaspora*). Konsep yang disebutkan pertama ini umumnya digunakan oleh para sejarawan dan antropolog untuk mempelajari pertukaran dan perkembangan ekonomi budaya lewat kontak-kontak yang terjadi antara para

pedagang dari komunitas yang berbeda, yang sekurang-kurangnya, untuk mengkaji peluang untuk surplus (*vent for surplus*) dan pengambilalihan ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of technology know-how*). Sementara konsep diaspora perdagangan dari Abner Cohen (seorang antropolog maritim) dikandung pengertian sebagai "*a nation of socially interde-pendent, but spacially dispersed communities*" (Cohen, 1971 : 267).

Dalam pembicaraan kita menyangkut topik ini, saya menetapkan menggunakan konsep jaringan perdagangan dan tidak membicarakan persoalan lintas budaya dari konsep diaspora perdagangan. Sehubungan dengan itu pembicaraan ini saya awali dengan penelusuran dan pengungkapan posisi bandar-bandar di Sulawesi Selatan dalam dunia pelayaran niaga di Asia Tenggara dan kemudian lintas budaya niaga (*cross cultural trade*) untuk mengungkapkan perubahan dan perkembangan yang terjadi di bandar-bandar itu.

Sulawesi Selatan dalam Dunia Maritim

Kenneth R. Hall, salah seorang ilmuwan yang menekuni kegiatan kemaritiman di Asia Tenggara, menyatakan bahwa sekitar abad ke-14 telah tumbuh dan berkembang lima zone perdagangan (*commercial zones*) dalam dunia niaga Asia Tenggara, yaitu zone perdagangan : Teluk Bengal, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Lat Jawa (Hall, 1985 :

20-25). Zone perdagangan Teluk Bengal meliputi pesisir Koromandel (India Selatan), Sailand, Burma, dan pesisir utara dan barat Sumatera; zone perdagangan Selat Malaka meliputi jazirah Malaka dan pulau-pulau sekitarnya; zone perdagangan Laut Cina Selatan meliputi pesisir timur semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan; zone perdagangan Laut Sulu meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan, dan zone perdagangan Laut Jawa meliputi kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, pesisir timur dan barat Kalimantan, Sumatera Selatan dan Jawa. Pernyataan Hall itu menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi spasial topik kita ini termasuk dalam zone perdagangan Laut Jawa, yang ketika itu berada dalam hegemoni Kerajaan Majapahit di Jawa Timur.

Meskipun demikian untuk menyimak kedudukan pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan pada periode itu sangat sulit apalagi untuk menentukan kapal pelabuhan-pelabuhan niaga itu tumbuh dan berkembang. Kata yang sering digunakan untuk menunjuk bandar-bandar yang terdapat pada pulau-pulau yang berada di bagian utara Pulau Sumbawa adalah Makassar (*Maquacer, Macacaes, Magasares, Magamsares, Macace*, atau *Makazar*). Keterangan menyangkut periode itu di Sulawesi Selatan hanyalah naskah Prapanca yang ditulis pada 1365 yang dikenal dengan sebutan Negara Kartagama. Dalam naskah disebutkan sejumlah nama yang dapat diidentifikasi sebagai Bantaeng, Luwu, Buton, dan Selayar, sementara nama Makassar tetap merupakan teka-teki, karena Makassar yang menjadi bandar terkenal pada paruh kedua abad ke-16 hingga 1669 itu dikenal dengan nama Sombaopu pada pesisir muara Sungai Jeneberang dan Tallo pada pesisir muara Sungai Tallo.

Kedudukan bandar-bandar di kawasan

ini baru mulai terungkap sedikit demi sedikit lewat keterangan tertulis ketika pedagang Eropa mulai terlibat dalam kegiatan perniagaan di Asia Tenggara. Setelah bangsa Portugis menduduki Malaka (1511) mereka memperoleh keterangan tentang pelayaran ke Maluku melalui jalur utara yaitu Malaka - Tanjung Pura Makassar - Maluku (Cortesau, 1944 : 226).

Pedagang-pedagang Jawa yang telah lama memasuki bandar-bandar niaga di Sulawesi Selatan hanya menggunakan ketika mereka berlayar dari Maluku ke zone perdagangan Laut Sulu dan ke zone perdagangan Selat Malaka (Hall, 1985 : 25; Poelinggomang, 1991 : 21 - 22). Pelayaran ke Maluku dilakukan menelusuri Kepulauan Nusa Tenggara ketika muson barat laut. Keterangan jalur pelayaran ke Maluku melalui Pulau-Pulau Makassar (*ilhas dos Maquecer*) telah mendorong pedagang Portugis mencoba melayarinya baik dari Ternate ke Malaka maupun sebaliknya. Perubahan itu yang merupakan awal mereka menginjakkan kaki di Sulawesi : Simo d'Abreu mendarat di Manado dalam pelayarannya dari Ternate ke Maluku pada tahun 1523 dan Jerge de Castro mendarat di Sombaopu dalam pelayarannya dari Malaka ke Maluku pada tahun 1528.

Dalam perkembangan kemudian bangsa Portugis mulai bergiat menjalin hubungan dengan bandar niaga di Sulawesi Selatan, yang ketika itu dikenal dengan nama *Macassar*; pendaratan yang pertama terjadi pada 1 Februari 1545 dan menempatkan Antonio de Payva dan pastor Vicente di Bacokiki, tempat yang kemudian dinamakan Machoquique yang berarti mendarat atau menginjakkan kaki di darat. Dari usaha menjalin hubungan perdagangan itu mulai tercatat sejumlah nama pelabuhan tertua di Sulawesi Selatan, seperti Gowa (Sombaopu), Tallo, Siang, Bacokiki, Suppa, Sidenreng,

Napo, dan Garasi. Di antara bandar niaga itu yang terbesar dan terpenting adalah pelabuhan Siang. Kerajaan Gowa dan Tallo konon pernah berada dalam pengaruh kekuasaan Siang dan penduduk bandar niaga itu pada tahun 1545 diperkirakan berjumlah 40.000 orang (Andaya, 1981 : 24).

Selain nama sejumlah bandar niaga itu, berdasarkan keterangan naskah lokal Kerajaan Gowa, masih dapat dicatat pula sejumlah bandar niaga lain, khususnya pada pesisir selatan dan timur jazirah selatan, seperti : Bajeng, Lengkesa, Polombangkeng, Lamuru, Lamatti, Bulukumba, dan lainnya. Bandar-bandar itu sekurang-kurangnya telah berperan sebagai pelabuhan singgah dalam pelayaran jalur dari Malaka ke Maluku dan sebaliknya dan koloni para pedagang yang menjalin hubungan niaga dengan bandar-bandar niaga lain dalam zone perdagangan Laut Jawa.

Gambaran ringkas ini memberikan petunjuk yang jelas kepada kita posisi bandar niaga di Sulawesi Selatan sebagai pelabuhan singgah yang penting bagi pedagang-pedagang yang melakukan pertukaran ekonomi antara zone perdagangan Malaka dan Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang merupakan komoditi utama zone perdagangan Laut Jawa. Selain itu bandar-bandar itu pula termasuk bandar-bandar niaga yang strategik bagi pelayaran para pedagang yang melakukan pertukaran eksternal antara zone perdagangan Laut Sulu dan Selat Malaka, dan zone perdagangan Cina (utara) dan Laut Jawa. Pedagang-pedagang Cina dari Canton, Nimphe, dan Amoy dalam pelayaran niaga ke Jawa dan Timor senantiasa memanfaatkan bandar niaga pada pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi menjadi pelabuhan singgah yang penting. Dengan kondisi perdagangan seperti itu tampak jelas betapa strategiknya posisi Sulawesi Selatan dalam dunia maritim. Posisinya berada pada silang utama antara jalur

pelayaran barat ke timur (Malaka ke Maluku) dan antara utara ke selatan (Cina ke Jawa dan Timor).

Posisi strategik dari Sulawesi Selatan dalam dunia maritim pada abad ke-16 itu, yang menurut pendapat saya telah mendorong Tumaparissi Kalonna (1510-1545), raja Gowa ke-9, setelah membentuk persekutuan dengan Kerajaan Tallo membangun bandar niaga mereka melalui strategi perluasan pengaruh kekuasaan. Usaha itu dimaksudkan untuk memaksakan pedagang-pedagang yang berada di bandar niaga lain memusatkan kegiatan mereka ke Sombaopu dan Tallo.

Tampaknya keinginan itu belum terpenuhi sehingga ketika Tunipalangga Uluweng (1546-1565) menduduki tahta kerajaan, ia melaksanakan kebijaksanaan yang saya sebut *makkanama nu mammio* (aku bertitah dan kamu taati), suatu rumusan singkat ikrar kerajaan-kerajaan taklukan, karena dengan mengikrarkannya ia mengangkut mereka dan barang mereka ke bandar niaga Sombaopu dan Tallo. Kebijakan itu bukan hanya memudahkan bandar-bandar lain di Sulawesi Selatan tetapi juga memperluas areal pemukiman di bandar Sombaopu dan Tallo sehingga areal antara Sungai Jeneberang di selatan dan Sungai Tallo di utara tampak sebagai satu bandar niaga, yang kemudian oleh pedagang-pedagang disebut Makassar.

Pedagang dan Koloni Dagang

Hall, dalam analisisnya tentang pelayaran niaga pada zone perdagangan Laut Jawa pada abad ke-14, lebih menekankan peranan pedagang Jawa dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dengan zone perdagangan lain dan bahkan juga pertukaran internal dalam zone perdagangan laut Jawa. Pedagang dan pelaut dari Sulawesi Selatan yang lazim disebut Bugis-Makassar tidak terlalu besar peranannya. Kelompok pedagang yang lain yang dipandang

merupakan imbalan pedagang dan pelaut Jawa adalah orang Melayu. Kelompok pedagang dan pelaut yang disebutkan terakhir ini juga yang dipandang mengawali jalur baru dalam pelayaran ke Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan di kawasan Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya beberapa ilmuwan yang menaruh perhatian pada kegiatan kemaritiman di Indonesia menyimpulkan bahwa pengetahuan kemaritiman orang Bugis-Makassar diperoleh dari dua kelompok pedagang dan pelaut yang telah diutarakan itu.

Terlepas dari pendapat tersebut, bila ditelusuri pemberitaan Tome Pires tampak bahwa kegiatan pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan tidak mengikuti jalur pelayaran yang selalu digunakan kelompok pedagang lainnya yang memusatkan kegiatan pelayaran niaga ke Maluku dan Timor. Secara umum Pires menggolongkan para pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang berlayar bersama wanita, membawa tombak dan melakukan perompakan dari negeri mereka hingga Pegu, Maluku, Banda, dan pulau-pulau sekitar Jawa. Barang yang dirampok dan budak-budak yang ditawan mereka jual di Jumaia (?). Mereka itu disebut Bugis (bujuus) oleh orang Jawa dan orang Melayu menyebut mereka Selates. Kelompok lainnya adalah mereka yang berbadan tegap dan selalu mengenakan keris; mereka membawa barang dagangan mereka dengan pangajavas yang besar (sejenis perahu dagang) yang memuat barang dagangan berupa beras putih dan emas. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Kalimantan, Siam, dan dengan semua bandar antara Pahang dan Siam (Cortesau, 1944 : 228-227).

Keterangan dari Pires ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penduduk Sulawesi Selatan telah bergiat dalam pelayaran niaga berdasarkan pengalaman leluhur mereka

terdahulu. Itulah sebabnya hingga paruh pertama abad ke-16 mereka belum terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana. Baru setelah itu, ketika pedagang Melayu eksodus ke negeri mereka akibat jatuhnya Malaka ke pihak Portugis pada 1511, mereka juga lambat laun terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Menurut pemberitaan Eredia, Makassar telah mengeksport rempah-rempah ke Malaka pada 1559 (Pelras, 1983 : 63), dan dalam perkembangan kemudian, sekitar abad ke-16 hingga tahun 1666 Makassar telah berperan sebagai bandar niaga inter-nasional terpenting di zone perdagangan Laut Jawa dengan kedudukan sebagai pe-labuhan transit (Reid, 1983 : 139).

Gambaran pelayaran niaga para pedagang itu menunjukkan terjadinya lintas budaya antara mereka dengan penduduk pada bandar niaga yang disinggahi. Kontak dan jalinan hubungan niaga pada dirinya memungkinkan pihak-pihak yang terlibat lebih mengutamakan unsur-unsur persamaan di antara mereka daripada perbedaan. Karena itu tidak jarang terjadi bahwa lewat kontak dan hubungan dagang penduduk bandar niaga mengizinkan pedagang asing yang menjalin hubungan, menetap di bandar niaga mereka, bahkan tidak jarang terjadi bahwa lokasi pelabuhan singgah para pedagang asing dijadikan bandar dengan mematerai nama asal pedagang asing itu, seperti misalnya bandar Garasi, tempat berlabuh para pedagang dari Gersik dalam pelayaran mereka ke zone perdagangan Laut Sulu (Gersik berubah bunyi menjadi Garasi).

Untuk menelusuri adanya pemukiman pedagang Jawa di bandar-bandar pesisir Sulawesi Selatan pada periode awal pelayaran niaga mereka sangat sulit. Keterangan yang diperoleh lebih banyak menyangkut perkawinan antara penguasa daerah ini dengan puteri

dari Jawa. Ana-kaji, putera dari Simpursiang - Tumanurung yang memerintah di Luwu diberitakan menikah dengan seorang puteri dari Mancapai (Majapahit) yang disebut We Tappacinna. Demikian pula Karaeng Lowe ri Sero, saudara raja Gowa ke-7, Batara Gowa, meninggalkan negerinya dan berlayar ke Surabaya. Setelah ia mempersunting seorang puteri dari Surabaya, ia kembali ke Tallo. Ia selanjutnya diterima dan dinobatkan menjadi raja Tallo yang pertama. Jalinan perkawinan itu memberikan petunjuk telah terjadinya hubungan yang erat antara penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan dan Jawa. Selain itu pula keterangan menyangkut tampilnya Nakhoda Bonang (seorang pedagang dari Jawa) sebagai perantara pedagang-pedagang Melayu (Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor) untuk memohon kepada raja Gowa agar mengizinkan mereka menetap di Makassar (Wolhoff dan Abdurrahim, t. thn : 25-28). Keinginan untuk berpindah ke bandar Kerajaan Gowa itu berkaitan dengan mudarnya bandar Siang dan Bacokiki, tempat di mana mereka telah menetap sejak tahun 1490-an, sebagai akibat kebijaksanaan Tunipalangga Ulaweng.

Pada periode pemerintahan raja Gowa ke-10 ini jugalah pedagang Portugis mendirikan loji di bandar niaga Gowa-Tallo yang telah disahkan dengan nama Makassar oleh pedagang-pedagang yang mengunjungi bandar itu. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dicatat pula sejumlah loji pedagang asing lainnya, seperti : Belanda yang mendirikan lojin-ya pada tahun 1607, Inggeris (1613), Spanyol (1615), Denmark (1618), dan Cina pada tahun 1618 (Stapel, 1922 : 9; Reid, 1983 : 139; Poelinggomang, 1991 : 29). Keterangan-keterangan menyangkut penggunaan kota pelabuhan Makassar oleh pedagang-pedagang yang berperan dalam dunia maritim di Asia Tenggara dan Asia Timur ini menunjukkan keberadaan bandar itu sebagai kota metropoli-

tan, tempat tersibuk, bukan hanya menyangkut pertukaran ekonomi, tetapi juga lintas budaya niaga (*cross cultural trade*).

Sehubungan dengan lintas budaya niaga ini dapat dicatat beberapa hal yang berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penggunaan pejabat sahbandar (*sabanara*) yang diambil alih dari pedagang Melayu, pembuatan kapal perang galei dari pedagang Portugis, dan pembuatan dan pemakaian amunisi dan meriam dari pedagang Inggeris. Pada pihak lain dapat pula dicatat sejumlah peluang untuk surplus menyangkut perluasan areal persawahan untuk meningkatkan produksi pangan dan perluasan jaringan pelayaran pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan. Pelaut dan asal daerah ini, setelah banyak melakukan kontak dengan pedagang asing, pelayaran niaga mereka telah tidak lagi terpusat ke arah barat saja tetapi juga telah melakukan pelayaran ke segala penjuru, ke Maluku, Nusa Tenggara terus mencapai pesisir utara Australia, ke Jailolo (pusat perdagangan zone perdagangan Laut Sulu), Manila, Makao, dan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan itu dapat disimpulkan bahwa budaya berlayar dan berdagang dari masyarakat Sulawesi Selatan sesungguhnya jauh telah berkembang sebelum terjadinya kontak dengan pedagang dari Jawa dan Malaka. Kontak-kontak yang terjadi kemudian dengan pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut luar, seperti Jawa, Melayu, Portugis, Spanyol, Inggeris, Denmark, dan Cina telah memberikan peluang bagi mereka untuk menikmati keuntungan dinamik, baik yang menunjuk pada "peluang untuk surplus" maupun "pengambil alihan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Lintas budaya niaga (*Cross cultural*

trade) di bandar-bandar pesisir Sulawesi Selatan sekurang-kurangnya telah berlangsung pada abad ke-14. Inten-sitas lintas budaya ketika itu masih bersahaja hingga akhir paruh pertama abad ke-16 pedagang dan pelaut daerah ini belum tampak memperluas jaringan pelayaran niaga mereka. Perubahan mulai tampak pada paruh kedua abad ke-16, pada saat bandar-bandar kecil di kawasan itu dipudarkan dan Makassar dijadikan sebagai satu-satunya bandar utama dan terpenting di Sulawesi Selatan. Kesemarakkan semakin meningkat ketika bangsa Cina dan Eropa menjadikan Makassar sebagai pangkalan dalam kegiatan niaga mereka di kawasan Indonesia, khususnya pada permulaan abad ke-17.

Pola pelayaran niaga dan keterbukaan penguasa bandar niaga menerima kehadiran pedagang asing itu menunjukkan bahwa kegiatan pelayaran niaga itu berpedoman pada prinsip *mare liberium* (laut bebas) dan kebijaksanaan pemerintah di Sulawesi Selatan adalah "politik pintu terbuka dan perdagangan bebas". ■

Dr. Edward L. Poeling-gomang, MA, alumnus Vrije Universiteit Amsterdam, Dosen Fakultas Sastra Unhas.

Kepustakaan

Andaya, Leonard Y.

1981 *The Heritage of Arung Palakka*, The Hague : Martinus Nijhoff

Abd. Razak Daeng Patunru

1983 *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang : YKSS

Cohen, Abner.

1971 "Cultural Strategies in the Organization of Trading Diaspora", dalam : Claude Meillassoux, ed., *The development of indigenous trade and markets in West Africa*, London: Cambridge University Press.

Cortessau, Armando

1944 *The Suma Oriental of Tome Pires and the book of Francisco Rodrigues*, London: Robert Maclehose & Co.

Hall, Kenneth R.

1985 *Maritime the and State Development in Early South East Asia*, Honolulu : University of Hawaii Press.

Noorduyn, J.

1983 "De Handelsrelatie van het Makassarse rijk Volgens de Notitie van Cornelis Speelman", dalam : *Nederlandse Historische Bronnen*, Vol. 3, hal. 97-123.

Pelras, Ch.

1983 "Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing", dalam : Gilbert Hamonic, ed., *Citra Masyarakat Indonesia*, Jakarta ; Sinar Harapan, hal. 56-82.

Poelinggomang, Edward L.

1991 *Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19*, Amsterdam : Centrale Hisdrukkerij VU.

Reid, Anthony.

1983 "The Rise of Makassar", dalam *RIMA*, Vol XVII, No. 1, hal. 117-160.

Stapel, F.W.

1922 *Het Bongaais Verdrag*, Leiden : Rijksuniversiteit.

Wolhoff, G.J. & Abdurrahim.

t.th *Sedjarah Goa*, Makassar : JKSS.

Sejarah adalah pertanggungjawaban masa lampau tentang apa yang telah kita perbuat untuk generasi sekarang dan akan datang

Erong Sebagai Salah Satu Peninggalan Tradisi Megalitik di Tana Toraja

Oleh : Albertinus

Pendahuluan

Dalam usaha mengungkap kepurbakalaan di Indonesia, untuk kesempatan ini perhatian kami tujukan pada daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja. Daerah ini berjarak kurang lebih 350 km arah Utara Kota Madya Ujung Pandang. Pegunungan, lembah dan sungai merupakan topografinya dengan ketinggian antara 300 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Jelaslah bahwa Kabupaten Tana Toraja yang luasnya kurang lebih 3178 km² berhawa sejuk.

Penduduk daerah Tana Toraja hidup dari bertani, berdagang dan sebagian menjadi pegawai Pemerintah maupun , Swasta. Kebanyakan penduduk Tana Toraja memeluk agama Kristen, sebagian lagi beragama Islam serta penganut kepercayaan lama Aluk Todolo. Hingga kini kepercayaan Aluk Todolo masih dapat kita saksikan. Penganut kepercayaan ini utamanya mereka yang telah lanjut usia.

Dengan keadaan alam seperti digambarkan diatas memungkinkan tumbuhnya kebudayaan megalitik dengan subur. Hubungan yang harmonis antara alam dengan manusia pada kebudayaan megalitik menghasilkan peninggalan - peninggalan megalitik. Peninggalan ini dapat berupa monumen maupun tradisi masyarakat. Ini sangat nyata didalam pelaksanaan upacara penguburan,

utamanya pada mereka yang menganut kepercayaan Aluk Todolo.

Selain upacara penguburan, masih terdapat beberapa upacara khusus yang mengandung aspek megalitik, misalnya upacara ma'nene, yaitu upacara yang bertujuan khusus memperingati arwah leluhur yang dapat berupa penggantian kain balutan mayat atau mengganti pakaian patung-patung leluhur dengan mempersembahkan sesajian. Pelaksanaannya tergantung pada kebiasaan daerah adat. Bukan tidak mungkin aspek megalitik di atas merupakan hal yang berkesinambungan dari pada tradisi megalitik yang hidup pada zaman sebelumnya.

Di Tana Toraja, monumen peninggalan megalitik dapat kita saksikan dalam bentuk menhir (batu tegak) yang berfungsi sebagai tempat mengikatkan kerbau. Juga sebagai pertanda bahwa di sekitar tempat dimana menhir itu berdiri pernah dilangsungkan suatu upacara. Selain menhir juga terdapat patung-patung nenek moyang yang berfungsi sebagai patung perwujudan dan lambang identitas si mati (Harun Kadir 1977; 95).

Pada masyarakat Aluk Todolo tidak semua orang dapat menggunakan patung perwujudan. Ini berkaitan dan sangat ditentukan oleh tingkat sosial yang berlaku. Hanya pada lapisan tertinggi sajalah yang

berhak menggunakannya. Lapisan masyarakat tertinggi di Tana Toraja dikenal dengan istilah Tana Bulaan dan Tana Bassi. Sedangkan lapisan masyarakat di bawahnya yang tidak diperbolehkan menggunakan patung perwujudan adalah mereka yang tergolong kedalam Tana Karunrung dan Tana Kua-Kua (Harun Kadir 1977; 93).

Selain monumen peninggalan megalitik di atas, terdapat peninggalan berupa peti kubur yang oleh penduduk setempat dinamakan erong. Peti kubur ini bentuknya sangat menarik karena dipenuhi oleh hiasan (ukiran) yang sangat indah. Sistem penguburan dengan menggunakan erong inipun tidak dapat dilepaskan dari pada sistem kepercayaan yang berlaku pada masyarakat pendukung kebudayaan megalitik. Bahkan sangat terikat pada sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakatnya.

Dari penelitian arkeologi di Indonesia memungkinkan adanya pertebaran yang luas dari tinggalan kebudayaan megalitik di kepulauan Nusantara. Tinggalan kebudayaan itu dapat kita jumpai dalam bentuk monumen-monumen ataupun ritus-ritusnya. Monumen-monumen itu berupa punden berundak-undak, kubur batu, sarcopagus, dolmen dan menhir (Soekmono 1973; 72-73). Dengan giatnya penelitian arkeologi di Indonesia, maka unsur diatas telah bertambah lagi dengan unsur baru berupa kalamba, lumpang batu, batu dakon dan arca-arca primitif, juga beberapa meja dan kursi batu (Haris Sukendar 1980; 11).

Pada mulanya peninggalan kebudayaan megalitik di Indonesia dianggap sebagai peninggalan kebudayaan dari zaman berkembangnya agama Hindu yang tersebar di Indonesia. Keadaan ini berlangsung kurang lebih setengah abad. Namun sejak Van der Hoop menerjunkan diri dalam dunia arkeologi Indonesia, beliau berhasil menjernihkan suasana ini dengan bukunya yang terkenal "Megalithic Re-

mains in South Sumatra", yang diterbitkan pada tahun 1932. Beliau menggugurkan pendapat sebelumnya dengan menyatakan bahwa peninggalan yang terdapat di Pasemah, Sumatra Selatan, bukanlah peninggalan yang berasal dari perkembangan tradisi agama Hindu di Indonesia, melainkan suatu peninggalan yang berasal dari periode akhir prasejarah. Bahkan Von Heine Geldern menunjukkan bahwa awal dari kebudayaan megalitik ini akarnya terdapat pada kebudayaan neolitik (Haris Sukendar 1976; 53). Sejak itu istilah megalitik mengisi konstruksi prasejarah Indonesia.

Ciri khas masyarakat megalitik adalah upacara yang menyolok pada waktu penguburan terutama upacara penguburan pada mereka yang semasa hidupnya mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Pelaksanaan penguburan dapat dilaksanakan dengan cara penguburan langsung (primary burial) ataupun dengan cara penguburan kedua (secondary burial). Wadah kuburnya dapat berupa wadah yang hanya mampu memuat satu mayat ataupun wadah yang dapat memuat beberapa mayat, berupa wadah kubur keluarga (Sujono 1969; 4).

Sistem penguburan pada masyarakat megalitik di atas selalu dihubungkan dengan alam pikiran dan kepercayaan masyarakat sebagai pengaruh kuat dari tradisi nenek moyang mereka. Dalam masyarakat tersebut, suatu kematian tidaklah membawa pengaruh esensial dalam status maupun sifat dan hanya orang yang memiliki kedudukan dan status itulah yang akan mencapai kedudukan khusus di dunia akhirat. Tetapi untuk mencapai itu amal jasa dan kebaikan serta bekal kubur tidak dapat diabaikan peranannya. Puncak dari suatu upacara penguburan adalah dengan didirikannya monumen-monumen dari batu atau kayu bagi yang telah mati. Dengan demikian terdapat konsep hidup masa depan

masyarakat megalitik, yakni bahwa apa yang telah dicapai selama hidup di dunia serta cita-cita yang diinginkan akan dilanjutkan dan didapat di alam akherat. Kesemuanya itu tergantung pada tindakan si mati selama hidup di dunia dan bagaimana besarnya upacara yang mengantar si mati ke alam puya. Kedudukan yang dicapai si mati dalam puya, nantinya akan menentukan pula kondisi kesejahteraan pada turunannya yang masih hidup. Terutama ditekankan akan adanya pengaruh yang kuat atas kesuburan tanaman dan kesejahteraan manusia (teguh Asmar 1975; 23).

Agar terdapat hubungan yang harmonis antara manusia dengan arwah leluhur, maka arwah leluhur perlu mendapat perhatian. Adanya perhatian ini ditandai dengan dilakukannya upacara-upacara pemujaan. Seperti halnya dalam upacara penguburan, yang tidak dapat mengabaikan unsur wadah kubur, maka unsur pendukung dalam upacara pemujaanpun tidak dapat diabaikan. Perlu pula diketahui, bahwa bentuk-bentuk wadah kubur yang diciptakan adalah diperlambangkan sebagai kendaraan yang digunakan menuju dunia arwah (Simanjuntak 1982/1983; 76).

Menilik kegiatan pada masyarakat megalitik tampaknya bahwa gagasan yang melatar belakangi ide-ide megalitik adalah pengagungan arwah leluhur (ancestor worship) yang mencapai puncaknya dengan hadirnya monumen-monumen dari pengagungan tersebut. Monumen-monumen itu bahannya dapat berupa batu atau juga kayu selama tidak mengurangi nilai dan tujuannya (Harun Kadir 1977; 93).

Dengan melalui pendekatan study arkeologi, penulis mencoba mengungkap makna bentuk, fungsi praktis dan fungsi simbolik serta sistim ritual yang menyertainya.

Deskripsi Temuan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan

di Toraja, diperoleh tiga macam bentuk erong. Bentuk-bentuk erong itu adalah bentuk rumah adat Toraja, tongkonan, bentuk kerbau, dan bentuk babi.

Erong bentuk tongkonan.

Erong bentuk ini dibuat dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan papan dan dengan melubangi batang pohon (tunggal). Bentuk yang dibuat mengacu pada bentuk badan tongkonan yang kemudian dilengkapi dengan tutup yang dibuat terpisah dengan mengikut bentuk atap rumah tongkonan. Apabila badan dan tutup disatukan, maka didapat bentuk rumah tongkonan tanpa tiang penyangga (kaki). Ukuran badan erong bentuk ini berkisar 200 cm x 40 cm x 100 cm dengan tebal dinding antara 7 sampai 10 cm. Khusus untuk erong yang dibuat dengan batang tunggal, besarnya disesuaikan dengan besar penampang batang pohon yang digunakan. Hal yang menarik pada erong yang berbentuk rumah tongkonan adalah karena padatnya hiasan yang terdapat pada badan maupun pada tutupnya.

Erong bentuk Kerbau dan Babi.

Dikatakan bentuk kerbau atau babi karena bentuknya mengikuti bentuk binatang tersebut, lengkap dengan kepala, badan dan kaki. Erong yang berbentuk kerbau atau babi semuanya dibuat dari batang tunggal. Untuk tempat mayat dibuat rongga pada bagian badannya dengan melubangi mulai dari punggung. Pada punggung inilah terdapat tutup erong yang dibuat sedemikian rupa dengan mengikut lekuk punggung kerbau atau babi.

Ukuran erong bentuk kerbau atau babi juga tergantung pada besar batang yang digunakan. Seperti halnya pada tubuh binatang kerbau atau babi maka badan erong bentuk inipun tidak dilengkapi dengan ukiran. Untuk erong bentuk kerbau biasanya dilengkapi dengan tanduk asli binatang tersebut. Sayangnya sekali tanduk-tanduk tadi telah banyak yang hilang, mungkin dicuri, terbukti pada beberapa

dengan tanduk asli binatang tersebut. Sayang sekali tanduk-tanduk tadi telah banyak yang hilang, mungkin dicuri, terbukti pada beberapa erong yang diamati terdapat bekas gergajian pada pangkal tanduknya.

Dalam pemanfaatannya sebagai peti kubur, maka ke dalam rongga tadilah mayat dimasukkan. Jumlah mayat yang dimasukkan tergantung pada kapasitas rongga. Dari hasil pengamatan, erong yang paling kecil bisa memuat dua mayat dewasa utuh. Kalau kita menemukan lebih dari dua kranium dalam erong ukuran terkecil, ini karena memasukkan mayat kedalam erong dilakukan setelah mayat tinggal rangka saja (*secondary burial*), sebagai akibat penyimpanan yang cukup lama (*primary burial*). Mengenai jumlah mayat yang disimpan dalam satu erong sepanjang penggunaannya tidak dapat kami tentukan secara pasti, karena ketika pembersihan/penataan mungkin saja orang lalu memasukkan kranium-kranium yang berserak pada erong mana saja.

Dari ketiga macam bentuk yang ditemukan, tidak selalu ketiga macam bentuk itu ada dalam satu situs, kecuali pada situs Suaya di desa Kairo, kecamatan Sangalla. Pada situs Ma'rimbunna Ke'te' dan Marante terdapat dua bentuk yaitu bentuk rumah tongkonan dan bentuk babi, sedangkan pada situs Lebonna terdapat dua bentuk yakni bentuk tongkonan dan bentuk kerbau.

Dari hasil pengamatan, mengenai letak erong tidak ditemukan keseragaman arah untuk semua situs, bahkan untuk satu situs. Pada situs Lebonna erong-erong malah diletakkan bertumpuk satu sama lainnya.

Temuan lain yang diperoleh pada beberapa situs adalah pinggan (*kandean dulang*) yang terbuat dari kayu, tempat tembakau, saraun (sejenis pelindung kepala dari hujan dan terik), unsur kain (ditemukan dalam salah satu erong), piring dan cangkir yang terbuat dari logam.

Demikianlah gambaran tentang peninggalan erong, yang pada bagian selanjutnya akan ditelaah kedudukannya dalam kebudayaan megalitik.

Pembahasan

A. Arti Bentuk Erong

Munculnya berbagai bentuk wadah kubur dengan berbagai variasinya membuktikan adanya perkembangan lokal yang semakin jelas dan mantap, dimana bentuk yang ditampilkan merupakan per-nyataan isi jiwa yang terikat pada gerak sakral dan profan masyarakatnya.

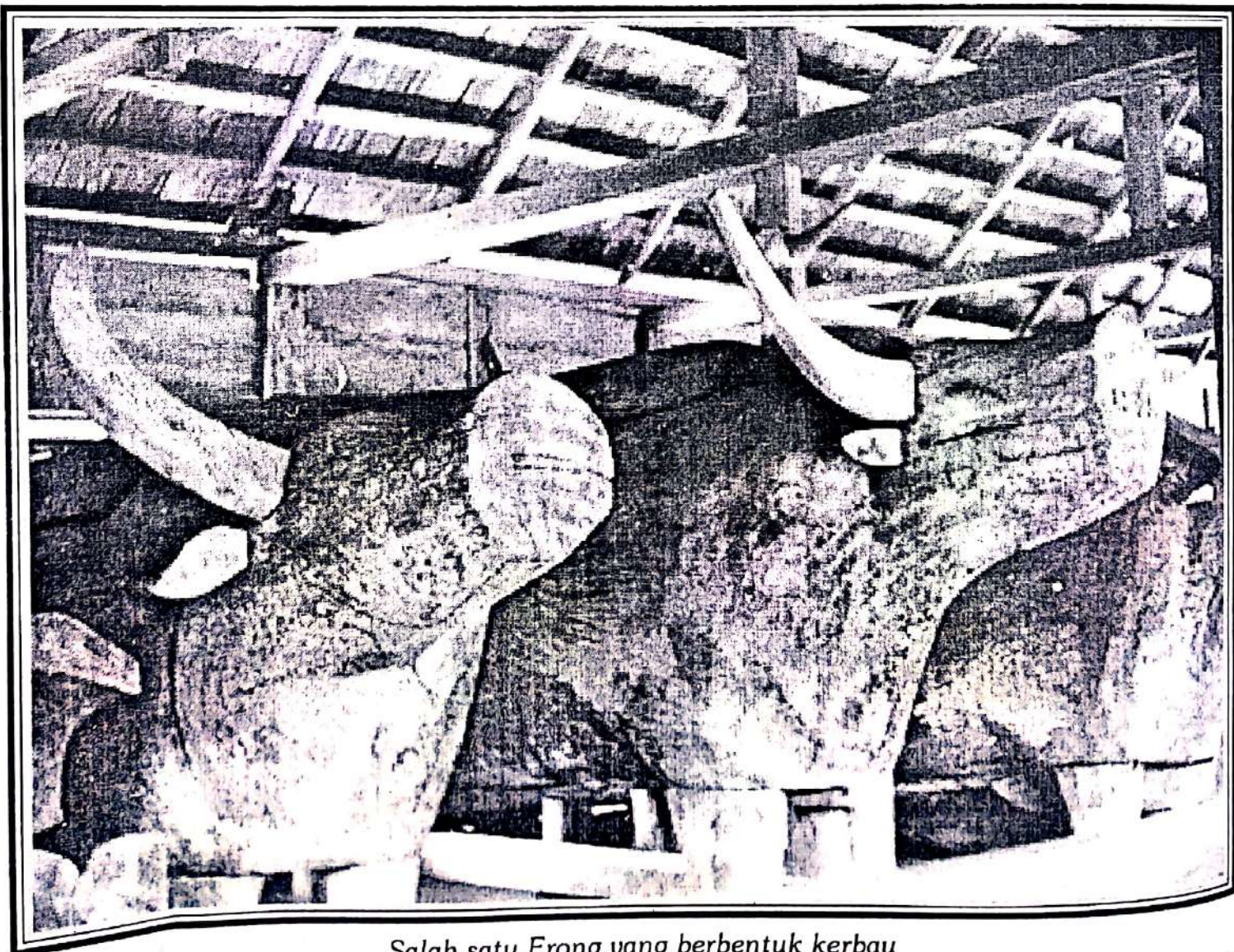
Di Tana Toraja terdapat peti kubur dari zaman berkembangnya tradisi megalitik yang dinamakan erong. Bentuk yang ditampilkan oleh erong tidak lepas dari gerak sakral dan profan masyarakat Aluk Todolo. Bukan tidak mungkin arti erong dengan bentuk rumah tongkonan mengacu kepada peranan dan arti yang dimainkan oleh rumah tongkonan. Pada mulanya tongkonan merupakan tempat tinggal dan tempat melaksanakan perintah oleh penguasa adat dalam satu daerah adat. Tongkonan dengan peranan di atas dinamakan tongkonan layuk. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya tongkonan menjadi pusat pembentukan dan ikatan keluarga dari satu turunan yang membangun tongkonan tersebut. Dari sinilah timbulnya beberapa istilah lain, seperti tongkonan pekamberan dan tongkonan a'riri (Tangdilintin 1975: 120, 1976: 21-22).

Bagi penganut kepercayaan Aluk Todolo suatu kematian tidaklah membawa perubahan esensial, kematian semata-mata hanya merupakan perpindahan tempat dari alam nyata ke alam puya. Apa yang dicapai di alam nyata akan demikian pula dalam alam puya. Untuk itu di alam puya pun diperlukan adanya tongkonan sebagai suatu tempat membina hubungan antara roh dalam ikatan

masih hidup adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh kepercayaan untuk membuat wadah kubur yang mengikuti bentuk rumah tongkonan. Dengan demikian arti dan peranan yang dibawa oleh hadirnya sebuah rumah tongkonan sama dengan arti dan peranan yang dibawa oleh suatu erong yang berbentuk rumah tongkonan. Sehingga erongpun menjadi pusaka dan warisan dari suatu turunan keluarga yang harus dijaga dengan baik. Nampak di sini bahwa pada masyarakat Toraja terutama para pendukung kepercayaan Aluk Todolo ditemukan juga adanya konsep hidup masa depan seperti yang umum terdapat di dalam masyarakat pendukung tradisi megalitik.

Pada erong yang berbentuk kerbau dan

babi artinya lebih ditekankan pada gerak sakral orang Toraja. Di dalam perjalanan hidup orang Toraja binatang kerbau dan babi tidak dapat dilepaskan daripadanya. Di dalam upacara kematian ataupun pemakaman, bagi penganut kepercayaan Aluk Todolo kerbau dan babi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Persembahan babi dan kerbau dalam satu upacara tergantung pada tingkatan upacara yang dilaksanakan. Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, orang Toraja percaya bahwa arwah daripada orang yang dimakamkan itu tidak akan mencapai alam puya untuk menduduki statusnya seperti ketika hidup di dunia. Apalagi sampai menduduki tingkatan Tomembali Puang.



Salah satu Erong yang berbentuk kerbau

Dalam ajaran Aluk Todolo ada tiga kekuatan yang harus dipuja, yakni Puang Matua sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Deata-Deata sebagai pemelihara dan penguasa isi bumi, dan Tomembali Puang atau arwah leluhur yang bertindak sebagai pengawas gerak gerik serta pemberi berkat kepada manusia turunannya (Tangdi-lintin 1975; 57). Tentunya intensitas pemujaan kepada ketiga medium di atas. Tomembali Puang atau arwah leluhur adalah oknum yang paling dekat dan sangat dibutuhkan peranannya oleh manusia hidup. Jadi tidak mengherankan jika kepadanya diberikan perhatian utama dalam upacara-upacara pemujaan. Dia disuapi dengan ketentuan kepercayaan yang berlaku. Dan di sinilah peranan babi dan kerbau sebagai alat pemuas Tomembali Puang. Dasar penilaian atau kerbau dan babi ini tentunya berlatar belakang pada konsepsi kepercayaan bahwa kedua binatang ini memiliki kekuatan magis religius yang sekaligus dimaksudkan sebagai kendaraan untuk orang yang telah meninggal.

Jika dilihat betapa besar peranan yang dimainkan oleh binatang kerbau dan babi pada penganut kepercayaan Aluk Todolo, tentunya sama arti dan peranan yang dimainkan oleh erong yang berbentuk kerbau dan babi. Sebagai kendaraan menuju dunia arwah.

B. Pola Hias Ukiran Erong

Pola hias ukiran erong hanya ditemukan pada erong yang berbentuk rumah adat Toraja (tongkonan). Goresan goresan yang ditampilkan kelihatan lebih hidup dan dinamis. Ini terlihat dengan padatnya serta banyak macamnya ragam hias yang terdapat pada badan dan tutup erong.

Beberapa macam pola hias ukiran itu antara lain :

1. Ukiran Pa'Tedong, merupakan gambar kepala kerbau yang melambangkan kerja

dan kemakmuran masyarakat Toraja.

2. Passura' Pa'sala'bi, ukiran yang berbentuk seperti pagar yang diartikan bahwa dalam pergaulan yang luas kita harus membatasi diri, jangan terlibat dalam pertentangan serta harus menjaga diri dari pengaruh luar.
3. Pa'Tangke Lumu', hiasan berupa spiral yang tidak terputus yang menandakan sebagai persekutuan yang erat dalam keluarga. Juga sebagai simbol adanya perkembangbiakan pada manusia untuk menempati segala penjuru bumi.
4. Passura' Pa'Barra'barra', melambangkan semua manusia sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Ukiran Pa'Erong
6. Ukiran Pa'Sulan.

Ada banyak ragam hias yang ada di Tana Toraja tetapi tidak seluruhnya terdapat pada erong. Demikian pula banyak ragam hias pada erong yang belum kami ketahui nama dan artinya. Ada hiasan berupa manusia yang dikepung oleh dua ekor ular dari dua arah, ada gambar kerbau yang dipagut oleh ular, gambar anjing yang menggigit ekor ular, ada hiasan berupa daun yang distilir dengan sangat indah. Ada juga ukiran berupa perpaduan antara dua macam pola ukiran, misalnya antara spiral dengan ukiran Pa'barra-barra. Dan masih banyak lagi ukiran yang tak dapat diuraikan di sini.

Demikianlah serba sedikit tentang pola hias ukiran erong.

C. Fungsi Erong

Jelaslah bahwa fungsi erong adalah sebagai peti mayat yang sekaligus berfungsi sebagai wadah kubur. Ini terbukti dari tulang-tulang dan beberapa tengkorak kepala (cranium) yang terdapat di dalam rongga erong. Dari ukuran besar erong dan banyaknya

Penutup

Jelas sudah bahwa di Tana Toraja terdapat beberapa peninggalan megalitik. Peninggalan itu berupa monumen ataupun ritusnya. Salah satu peninggalan megalitik di Tana Toraja adalah erong yang berfungsi sebagai peti kubur dari turunan satu tongkonan. Bentuk erong seperti rumah tradisional Toraja, binatang babi atau kerbau merupakan pernyataan isi jiwa, baik sebagai gerak sakral maupun sebagai gerak profan masyarakat Toraja. Gerak sakral maupun gerak profan ini dimotifasikan pada pemujaan arwah leluhur. Pemujaan arwah leluhur (Tomembali Puang) di Tana Toraja merupakan tradisi megalitik yang meluas di Indonesia. Dengan demikian erong di Tana Toraja merupakan salah satu peninggalan megalitik yang tersebar di Indonesia.

Dilihat dari perspektif "sekarang" erong yang terdapat di Toraja bagi kita adalah merupakan warisan budaya. Erong adalah satu mata rantai kebudayaan megalitik di Indonesia. Sebagai warisan budaya dan sebagai bagian dari untaian kebudayaan bangsa dan negara, kita wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan serta memperkenalkan pada dunia luar. Inilah satu bagian dari keanekaragaman budaya bangsa kita. Keragaman yang tentram dibawah falsafah Pancasila, dalam negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. ■

Drs. Albertinus, Staf Suaka PSP Sulselra
Ujung Pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Haris Sukendar

1976 "Tinjauan Tentang Bentuk Peti Batu Megalitik di Indonesia", Bulletin Yaperna, No. 11 Tahun III, Jakarta.

1977 "Tinjauan Tentang Peninggalan Tradisi Megalitik di Daerah Sulawesi Tengah", PIA. I. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.

1980 "Tinjauan Tentang Berbagai Situs Megalitik di Indonesia", PIA. II. Jakarta. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.

1980 "Mencari Peninggalan Nenek Moyang Pendukung Tradisi Megalitik di Tana Bada (Sul-Teng)". Maj. Kalpataru. No. 5, Pus. P3N, Jakarta.

1981/1982 "Tradisi Megalitik di Indonesia", Maj. Analisis Kebudayaan, Th. II. No.1. P dan K, Jakarta.

Harun Kadir

1977 "Aspek Megalitik di Toraja", PIA. I. Cibulan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta.

Soejono, R.P

1969 "On Prehistoric Burial Methods in Indonesia", Buletin of The Archaeological Institute of The Republic of Indonesia, No. 7, Jakarta.

Soekmono, R. Drs

1981 Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I. Yayasan Kanisius, Jogjakarta.

Tangdilintin, L.T

1975 Toraja dan Kebudayaan, YALBU, Tana Toraja.

Teguh Asmara

1975 "Megalitik di Indonesia, Ciri dan Problemnya". Bulletin Yaperna. No. 7 Th. II. Jakarta.

Kelestarian benda cagar budaya penting bagi pemupukan rasa kebanggaan Nasional, kesadaran jati diri dan kemanfaatan Nasional

Beberapa Catatan Tentang Situs Makam- makam Kuno di Sudiang

Oleh : Irwani Rasyid

Pengantar

Keberadaan Islam di Indonesia yang memulai perkembangannya pada awal abad ke-13 seiring dengan diterimanya secara resmi oleh Raja-raja dan rakyat dari kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, kepulauan Maluku, Nusa Tenggara termasuk Sulawesi Selatan. Penerimaan Islam ini telah melahirkan suatu produk budaya yang turut mewarnai kepurbakalaan Islam di Indonesia khususnya pada bidang seni rupa Indonesia di mana unsur-unsur utamanya merupakan kelanjutan dari tradisi budaya zaman pra-sejarah, klasik sampai Islam. Salah satu wujud kepurbakalaan Islam yang paling menonjol adalah berupa makam atau kubur.

Kubur atau makam ini merupakan cara penguburan sekaligus menjadi bangunan yang dikeramatkan berkaitan dengan tokoh yang dimakamkan. Bahkan pada beberapa makam mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa berupa pemberian hiasan yang sangat indah dan mewah.

Daerah Sudiang yang terletak di kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang termasuk satu kawasan yang memiliki situs kepurbakalaan yang sangat potensial untuk diteliti berupa makam-makam kuno di samping situs pemukiman/bekas istana raja dan lain-lain.

Makam-makam kuno di Sudiang sangat menarik karena memiliki unsur-unsur yang tidak biasa dijumpai pada makam-makam lain di daerah Sulawesi Selatan.

Unsur tersebut berupa gunung yang ditempatkan pada bagian kepala dan kaki makam dan diberi hiasan berbagai motif.

Tinjauan Historis

Situs makam-makam kuno di Sudiang terbagi dalam tiga kompleks makam, yaitu:

1. Kompleks makam Karaeng Loe ri Bentang,
2. Kompleks makam Datuk Mandar,
3. Kompleks makam Bate Salapang.

Ketiga situs makam tersebut merupakan bukti akan kehadiran kerajaan Bentang atau Sudiang di masa silam. Awal mula berdirinya kerajaan Sudiang sebagai satu kesatuan politik, ekonomi dan sosial belumlah dapat di ketahui dengan pasti baik dari Sumber lontarak maupun sumber tertulis lainnya. Dari informasi lisan hanya disebutkan bahwa pada saat berdiri kerajaan Sudiang mempunyai beberapa raja di antaranya Tomanurung sebagai raja Sudiang I dilanjutkan oleh Tika Dg. Matutu hingga kemudian digantikan oleh Sugi Dg. Nimaning sebagai raja Sudiang III. Beliau merupakan salah seorang raja Sudiang yang sangat berpengaruh bukan hanya di lingkungan kerajaannya tapi juga sampai di kerajaan lain Gowa, misalnya. Menurut informasi disebutkan bahwa Sugi Dg. Nimaning bersama saudaranya Bira mengangkat Karaeng Loe ri Sero menjadi raja Tallo setelah memisahkan diri dari kerajaan Gowa. Pada saat itu pula Bira bergabung dengan kerajaan Tallo, namun pada masa pemerintahan raja Tallo II karena adanya



Ragam hias gunung makam di kompleks Makam Sudiang

perbedaan prinsip akhirnya Bira memisahkan diri. Masa pemerintahan Sudiang Dg. Nimaning se zaman dengan raja Gowa VI (Batara Gowa) sekitar penghujung abad ke VI. Pada masa pemerintahannya untuk pertama kalinya pengangkatan pejabat bendaharawan kerajaan yang berasal dari daerah Mandar yaitu Datuk Mandar. Pengangkatan ini membuktikan diterapkannya prinsip demokrasi di kerajaan Sudiang bahwa siapa yang mampu dan mempunyai keahlian dalam rangka kemajuan kerajaan akan diberi posisi penting sesuai keahliannya walaupun bukan keluarga atau keturunan raja. Setelah Sugi Dg. Nimaning mangkat digantikan oleh Dg. Masarro sebagai raja Sudiang IV kemudian

dilanjutkan oleh Dg. Patobo selaku raja sudiang/ karaeng loe ri bentang V. Kerajaan Sudiang sebelum bergabung dan menjadi kerajaan sekutu Gowa bernama kerajaan Bentang. Proses perubahan nama ini berawal sejak kerajaan Bentang menjadi tempat pembuangan tahanan dari kerajaan lain sehingga menjadi Kodia dan karena terjadi hal-hal tertentu pada raja Tallo III maka Sudiang dipanggil oleh kerajaan Gowa untuk membantu perang Tallo dan mulai saat itulah Kerajaan Bentang di bawah kerajaan Gowa dan bernama Sudiang. Dan setelah kedatangan Belanda Sudiang menjadi Gallarrang Sudiang.

Adanya aliansi antara kerajaan Gowa dan Sudiang ini nampaknya mempengaruhi struktur

kekuasaan dikedua kerajaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan Bate Salapang di mana jabatan ini dalam sejarah perjalanan kerajaan Gowa tetap dipegang oleh raja-raja Bentang seperti Basse Laikang yang bersuamikan Lallo Dg. Ngawing menjadi Bate Salapang II kemudian Bimbi Dg. Sibbo yang bersuamikan Bangngo Dg. Mallingkaang sebagai Bate Salapang III kemudian digantikan oleh Sugi Dg. Nimaning yang bersuamikan Pakkai Dg. Marala menjadi Bate Salapang IV. Pakkai Dg. Marala adalah seorang keluarga kerajaan Sudiang yang membawa raja Gowa IX yakni I Tajibarani Karaeng Data yang terbunuh di Bone kembali ke Gowa.

Setelah Bate Salapang ke-empat ini tidak diketahui lagi Bate Salapang selanjutnya karena Belanda sudah masuk di Sulawesi Selatan dan jabatan raja Bentang yang saat itu telah berganti menjadi Sudiang dan bergabung dengan kerajaan Gowa. Rajanya bergelar Karaeng Sudiang dan diangkat oleh kerajaan Gowa.

Gambaran Umum Situs

Seperti telah disebutkan di depan bahwa temuan arkeologi di situs Sudiang sangat potensial, khususnya berupa situs makam kuno. Situs makam tersebut adalah : Kompleks makam Karaeng Loe ri Bentang, Kompleks makam Datuk Mandar dan Kompleks makam Bate Salapang. Berikut ini gambaran singkat masing-masing situs.

1. Kompleks makam Karaeng Loe ri Bentang

Sesuai dengan namanya maka di kompleks ini dimakamkan raja-raja Sudiang dan keluarga, namun dari 11 buah makam hanya 4 buah makam yang diketahui identitasnya yaitu makam karaeng Loe ri Bentang (Sugi Dg. Nimaning, makam Dg. Siwigi, makam Dg. Masarro dan makam Dg. Patobo). Keseluruhan makam dalam keadaan rusak

bahkan sebahagian telah mengalami kehancuran dan ditumbuhi semak belukar karena tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Mengamati bentuk makam yang berdenah segi empat panjang dengan orientasi utara selatan memberikan indikasi suatu makam Islam namun tidak mempunyai nisan. Beberapa makam diberi gunungan pada bagian kepala dan kaki makam dengan bentuk yang sangat sederhana. Teknik pembuatan makam berupa sistim papan batu berlapis satu atau dua batu dihubungkan dengan pen membentuk jirat. Bahan yang dipergunakan untuk pembuatan makam adalah batu padas. Ukuran makam ber-variassi ada yang besar, sedang, dan kecil. Ragam hias sebagai komponen pelengkap pada suatu makam nampaknya pada kompleks makam ini sangat sedikit selain pada gunungan makam Dg. Siwigi. Hiasannya berupa motif geometris dalam bentuk pilin yang digayakan dibuat dengan teknik ukiran, sedangkan inskripsi sebagai petunjuk suatu makam tidak terdapat sama sekali.

2. Kompleks makam Datuk Mandar

Makam yang berada di-sebelah utara makam Karaeng Loe ri Bentang kondisinya tidak berbeda jauh. Beberapa makam dalam keadaan rusak bahkan ada yang telah hancur ditumbuhi tanaman perdu dan semak belukar.

Makam yang utuh tinggal 4 buah, sedang makam Datuk Mandar sendiri jiratnya sudah rusak. Keseluruhan bentuk makam memperlihatkan makam Islam di-dasarkan atas orientasi atau arah bujur utara selatan dengan denah empat persegi panjang dibuat dengan sistim papan batu ditopang dari bawah ke atas dua susun sehingga nampak bersusun tidak mempunyai nisan dan pada bagian kaki dan kepala jirat atau kijing diberi gunungan. Bahan untuk pembuatan komponen makam adalah batu gunung. Namun khusus makam Datuk Mandar tidak mempunyai gunungan, tetapi

diberi nisan yang merupakan tipe nisan khas Sulawesi Selatan yaitu berupa nisan hulu keris pada bagian kaki jirat dan nisan gadah bermahkota di bagian kepala jirat. Kondisi makam datuk Mandar sudah mulai rusak dan nisannya agak aus namun nampak masih mendapat perawatan. Hal ini dibuktikan dengan keadaan makam yang bersih dan adanya bekas-bekas pedupaan, bahkan untuk menyelamatkannya dari kerusakan yang lebih parah oleh masyarakat setempat telah memberinya atap dari seng yang berfungsi cungkup. Bahan yang dipergunakan untuk nisan adalah batu karang. Seperti halnya makam di kompleks Karaeng Loe ri Bentang maka ukuran makam di kompleks ini juga bervariasi ada yang besar, sedang maupun yang berukuran kecil. Ornamen sebagai penghias suatu makam nampak pada nisan gadah bermahkota maupun pada nisan hulu keris. Hiasannya berupa motif geometris (pilin) dan hiasan kala yang distilir. Yang menarik pada makam ini adalah terdapatnya inskripsi berbahasa Arab terdiri dari empat baris menghiasi 2 bidang dari 6 bidang pada badan nisan gadah. Tulisan Arab tersebut berbunyi : *Laailaha Illallah* (tiada Tuhan selain Allah).

3. Kompleks makam Bate Salapang

Kondisi makam di kompleks ini masih baik dan utuh hanya saja karena kurang mendapatkan perawatan maka banyak ditumbuhi lumut dan rumput. Melihat denah makam yang berorientasi utara selatan dengan bentuk empat persegi panjang menunjukkan makam Islam. Keseluruhan makam yang berjumlah 9 buah diberi gunung pada bagian kepala dan kaki jirat dan nampaknya menjadi komponen utama makam di kompleks ini. Nisan sebagai unsur pokok dari suatu makam ternyata hanya terdapat pada makam Mesekang Dg. Tula dan makam Dg. Gassing, berupa nisan pipih persegi empat dan nisan patung manusia dalam bentuk yang sederhana, di-tancapkan di atas makam pada bagian kaki.

Pembuatan makam tersebut tampaknya dilakukan secara ber-samaan. Hal itu dapat dilihat dari ukuran, bentuk dan bahan batu yang sama, dibuat dari papan batu yang dipasang melebar diatas makam bersambung antara satu makam dengan makam lainnya.

Dibagian tengah setiap jirat papan batunya dilubangi membentuk empat persegi panjang untuk tempat nisan. Adapun bahan batu seluruh makam baik jirat, nisan dan gunung dari batu padas. Di kompleks makam ini tidak ditemukan ornamen atau hiasan dekoratif kecuali bentuk gunung yang dibuat tidak meruncing sebagaimana bentuk gunung lainnya, namun pada puncaknya dibuat datar saja dan pada pinggir gunung diberi terap-terap dan pada gunung tersebut tidak ditemukan inskripsi.

Penutup

Sebagai peninggalan sejarah dan purbakala maka situs makam di Sudiang memperlihatkan kesederhanaan dengan ciri-ciri khas yang unik baik dari beniuk makam, nisan, gunung maupun ornamen atau ragam hiasnya.

Dengan melihat bentuk bangunan makam yang bervariasi menunjukkan bahwa yang dimakamkan di sini adalah tokoh atau orang yang berpengaruh pada zamannya. Makam ini memberikan indikasi bahwa situs tersebut sudah cukup lama menjadi kawasan pemakaman dan pemukiman. Selain itu dengan melihat ornamen makam menunjukkan adanya akulturasi budaya antara Islam dengan nilai-nilai yang sudah lama dikenal masyarakat. Hal ini nampak pada hiasan kala berbentuk lengkungan omega digayakan dalam bentuk floraistik di mana hiasan tersebut menurut kepercayaan Bugis Makassar merupakan simbol keberuntungan dan kesuburan. Hiasan ini dikenal dalam kesenian Islam sebagai motif naturalis yang menggunakan anasir-anasir

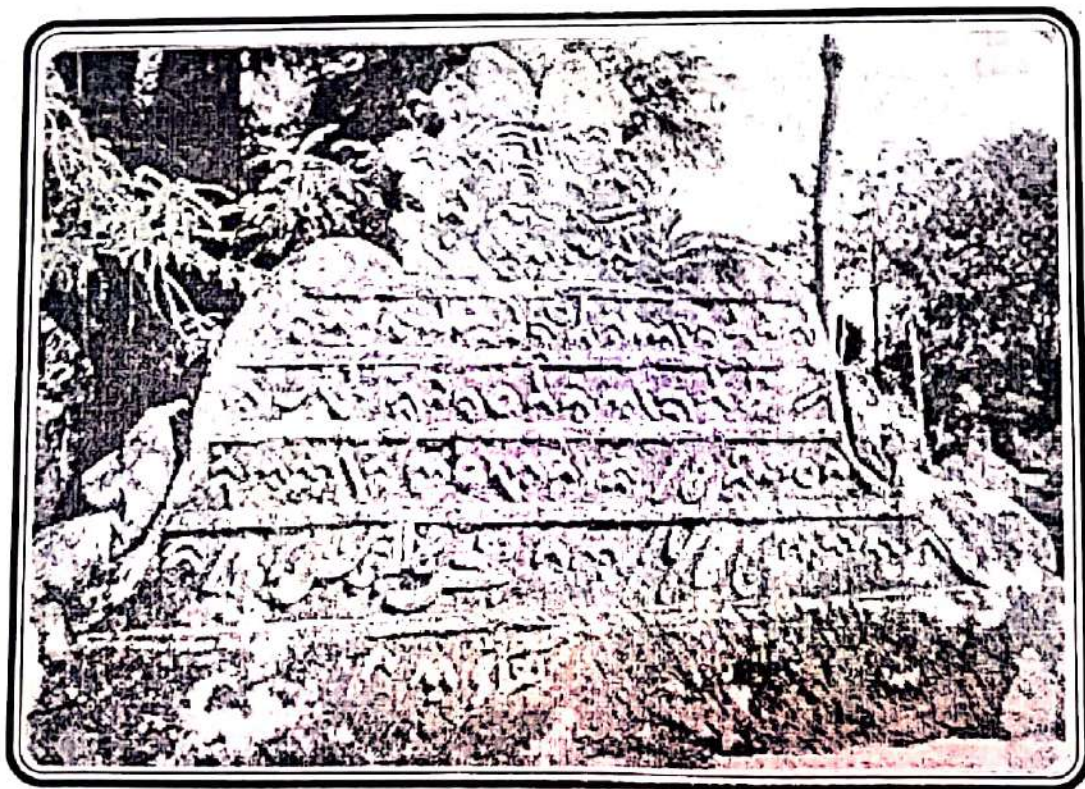
hinduistis.

Berdasarkan hal ini maka dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai warisan dan asset budaya bangsa yang sangat bernilai strategis hendaknya situs makam kuno di Sudiang mendapatkan penanganan yang tepat dan terpadu agar potensi budaya ini dapat diselamatkan dari kehancuran. Karena hancur dan musnahnya benda cagar budaya akan berakibat hilangnya kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu karena penelitian tentang situs makam-makam kuno Sudiang belum mencapai hasil yang cukup memadai bagi penulisan sejarah, maka penelitian lanjutan perlu dilaksanakan agar nantinya dapat memberikan gambaran tentang fungsi dan alam pikiran para pembuatnya.

Dra. Irwani Rasyid, Staf Suaka PSP Sulselra
Ujung Pandang.

Daftar Pustaka

- Halina Budi Santoso, "Beberapa Bentuk Nisan Kubur di Daerah Banten Lama," Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1979.
- Hasan Muarif Ambari, "Tradisi Islam pada Sistem Pemakaman di Indonesia," Makalah, Pertemuan Ilmiah Arkeologi, 1981.
- Lukman Nurhakim, "Tinjauan Tipologi Nisan pada Makam Islam Kuno di Indonesia." Proceeding AHPA I, 1987. Jakarta. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 1990.
- _____, Laporan Penelitian Makam-makam Kuno Masa Islam di Sulawesi Selatan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 1993.
- _____, Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kotamadya Ujung Pandang. 1985.



Inskripsi pada Makam Palangkei Karaeng Lagu

Antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Oleh : Nikolaus

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (LN. Th. 1981 No. 76, TLN. No. 3209) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, adalah hukum nasional kodifikasi yang merupakan realisasi dari pada cita-cita hukum nasional yang di dalamnya tercermin prinsip-prinsip dasar bagi perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia di dalam proses perkara pidana. Undang-Undang ini juga mengatur dengan tegas prinsip dasar akan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyidik. Pula menyangkut hubungan instansional di antara sesama komponen aparat penegak hukum.

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dikatakan bahwa : Penyidik adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia" atau "pejabat pegawai negeri sipil tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya yang dimaksud penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan tersebut me-nyebutkan dengan tegas bahwa fungsi penyidikan diserahkan kepada "pejabat polisi" dan "pejabat pegawai negeri sipil" yang memiliki syarat-syarat tertentu. Menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, untuk

anggota Polri sekurang-kurangnya berpangkat "pembantu letnan dua", sedangkan untuk pegawai negeri sekurang - kurangnya berpangkat "pengatur muda" Tk.I (Gol dua B), atau yang disamakan dengan itu.

Selain Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari berbagai departemen, masih terdapat penyidik di dalam tindak pidana tertentu, yaitu : Perwira TNI Angkatan Laut yang diangkat oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 dan pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Tindak Pidana di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu, penuntut umum yang berfungsi sebagai satu-satunya aparat Penuntut (*Single prosecutor*) untuk semua jenis tindak pidana (pidanan umum maupun pidana khusus) dalam tindak pidana : Ekonomi, korupsi dan subversi, juga dibebani tugas sebagai penyidik.

Karena itu, dalam operasional penyidikan tidaklah mengherankan jika terjadi adanya tumpang tindih di dalam penanganan suatu kasus sebagai akibat banyaknya aparat/pejabat penyidik. Kondisi demikian mengakibatkan merenggangnya suasana koordinasi di kalangan penyidik utama (Polri) di satu pihak dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pihak lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas dari hasil penyidikan.

Dalam pada itu, perlu dipahami semua aparat penyidik bahwa apabila mutu hasil penyidik kurang sempurna, akan menimbulkan beban yang berat bagi Penuntut

Umum, di dalam proses pemeriksaan perkaranya. Dan jika Penuntut Umum gagal membuktikan dakwaannya karena hasil penyidikan mengandung cacat formal maupun material, berarti tugas "*Law enforcement*" tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain akan berdampak kurang menguntungkan dalam penilaian kualitas kemampuan dan cita semua aparat/ komponen terkait dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana dimaksud.

1. Batas Kewenangan

Penyidik Polri pada dasarnya dapat menangani semua bentuk tindak pidana, karenanya disebut penyidik utama dengan batas-batas kewenangan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat menangani kasus tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang membawahnya dan dalam pelaksanaan dibawa koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Secara tegas, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Ada kemungkinan wewenang itu diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya atau jika tidak maka penyidik pegawai negeri dapat berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M-04-PW.07.03 tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 3 dikatakan : Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas wewenang yang diberikannya yang diberikannya, maka penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, khususnya yang berkenaan pasal 7 ayat (2) dan pasal 107 ayat 1, 2 dan 3 dikeluarkanlah Surat Keputusan Kapolri No. Skep. 369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kapolri No. Pol : Juklak/37/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Petunjuk Teknis (Juknis) Kapolri No. Pol: Juknis/16/ VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam Juklak dan Juknis Kapolri tersebut, tergambar dengan jelas hubungan dan keterkaitan antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), baik menyangkut bidang operasional maupun pembinaan. Begitu eratnya hubungan dan keterkaitan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka oleh banyak orang sering digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan namun bisa dibedakan. Dengan demikian

dapatlah dipahami dengan jelas bahwa kehadiran PPNS bukanlah sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan tugas dan pekerjaan penyidik Polri yang tidak terjangkau, melainkan secara yuridis formal kehadiran PPNS memang merupakan suatu kebutuhan nasional, menjadi mitra kerja penyidik Polri sesuai batas kewenangan yang dimiliki dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun secara instansional tidak berada dalam satu atap.

2. Hubungan Kerja

Yang dimaksud hubungan kerja dalam hal ini adalah hubungan fungsional antara PPNS dengan penyidik Polri yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu. Secara nasional, koordinasi fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq. Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri, serta unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil/Polwiltabes, Poltabes/Polres/Polresta, Polsek/ Polsekta).

Hubungan kerja secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan yang bersifat diagonal, pengaturannya adalah :

- 1) Tingkat Departemen/Instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri;
- 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNS pada Ditserse Polda/Polwil (untuk propinsi yang setingkat Polwil).
- 3) Tingkat Kantor Kabupaten/ Kota Madya berhubungan dengan unsur PPNS pada Sat Serse Polwiltabes/Poltabes/Polres/Polresta.

- 4) Tingkat Kantor Kecamatan langsung dengan Polsek/ Polsekta.

Secara garis besar, hubungan kerja dalam bentuk koordinasi dan pengawasan, terbagi atas dua bentuk, yakni :

- 1) Koordinasi operasional yang meliputi pemberian petunjuk, pemberian bantuan penyidikan dan pengawasan;
- 2) Hubungan pembinaan meliputi pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan dan pembinaan sistim laporan.

Dengan menarik esensi hubungan kerja, tugas kewajiban serta wewenang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka telah menjadi keharusan bahwa semua PPNS dari berbagai departemen yang pembinaannya dibawah penyidik Polri, wajib melaporkan/ mengkoordinasikan semua kegiatannya kepada penyidik Polri. Hal ini dapat dipahami oleh karena semua komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana, sepenuhnya dipertanggung jawab-kan kepada Polri. Disamping itu sebagai konsekwensi logis adanya kewenangan dalam pengawasan, maka tanggung jawab yuridis yang timbul dalam kegiatan penyidikan PPNS, dilaksanakan secara berimbang.

Kondisi demikian ini tidaklah berarti bahwa akan menambah satu mata rantai yang cenderung lebih bersifat birokratis dan akan timbul kesan kredibilitas PPNS, seolah diragukan. Undang-Undang telah menggariskan demikian tiada lain untuk menghindari timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki dalam penerapan dan pelaksanaan KUHP.

PPNS Cagar Budaya

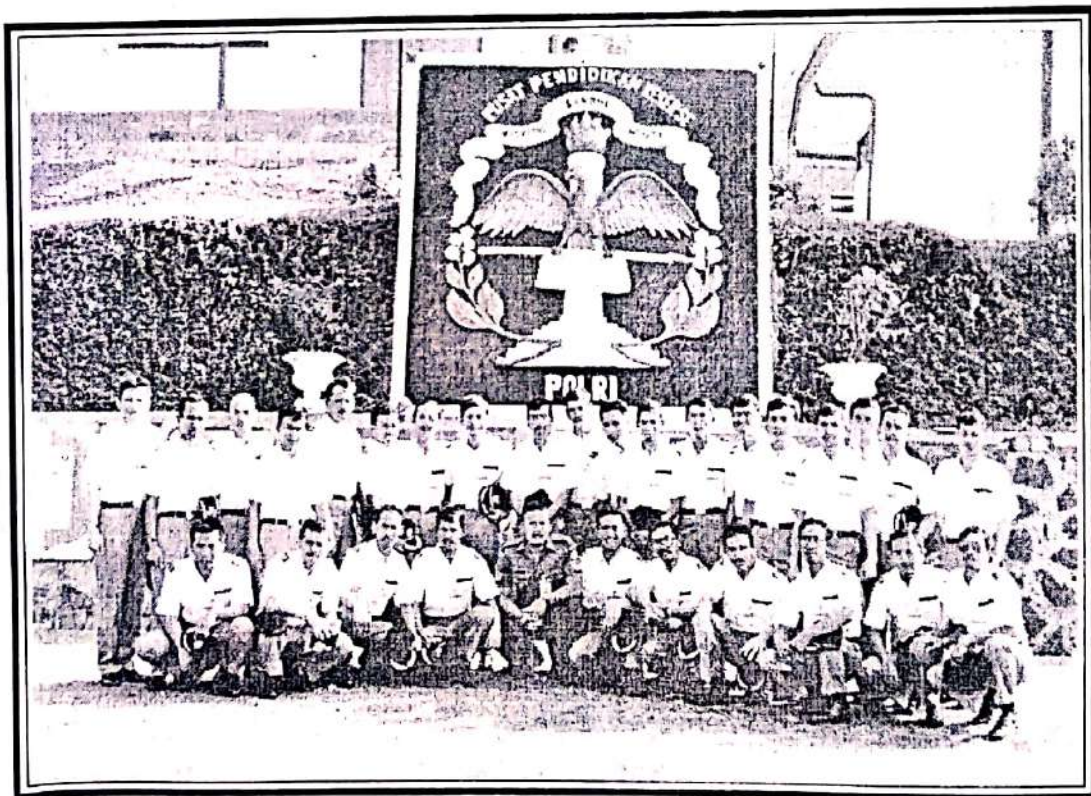
Direktorat Jenderal Kebudayaan Cq Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang

berada di bawah lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI secara resmi mempunyai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah pejabat/pegawai yang diusulkan untuk menjadi PPNS dimaksud, diangkat melalui Keputusan Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kini, PPNS Cagar Budaya dimaksud baru berjumlah sekitar 60 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ditempatkan/berada pada kantor-kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang baru berjumlah 5 buah diseluruh Indonesia. Sebagian juga berada

pada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta.

Dikatakan "PPNS CAGAR BUDAYA" oleh karena undang-undang yang menjadi dasar hukumnya ialah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (LN Tahun 1992 Nomor 27). Dalam pasal 25 Undang - Undang Benda Cagar Budaya disebutkan: atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pengganti peraturan benda cagar budaya yakni Monumenten Ordonantie (MO)



Calon PPNS Cagar Budaya Angkatan I saat foto Bersama di Lapangan Upacara Pusat Pendidikan Serse POLRI Megamendung Bogor-Jabar Tahun 1991

Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238) produk kolonial Belanda.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tugas pokok PPNS Cagar Budaya adalah menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tugas dan Kendalanya

Sebagai penyidik yang baru lahir andaikan manusia masih berumur "balita", PPNS Cagar Budaya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam kegiatannya. Kendala yang dimaksud meliputi :

- a. Bidang taktis, yakni masih minimnya sarana dan prasarana penyidikan yang dimiliki.
- b. Bidang teknis, yakni masih rendahnya tingkat kualitas pengetahuan yang dimiliki, utamanya yang menyangkut identifikasi dan teknik/ taktik pemeriksaan.
- c. Bidang geografis, yakni luas-nya wilayah kerja meliputi dua propinsi (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).
- d. Bidang dana, yakni tidak adanya anggaran khusus operasional penyidikan.
- e. Bidang personil, yakni masih kurangnya tenaga penyidik (PPNS Cagar Budaya), kini hanya berjumlah 6 (enam) orang.

Dari kendala dan hambatan yang disebutkan di atas, maka banyak kasus tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran benda cagar budaya yang terjadi selama ini tidak dapat ditangani dan diselesaikan.

Kendala lain yang cukup besar pengaruhnya terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan penyidikan selama ini yakni masih kurangnya pemahaman masyarakat bahkan pejabat beberapa instansi

terkait akan arti pentingnya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

- Dasar hukum keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dengan batas kewenangan sebagaimana disebutkan pada pasalnya yang ke 7 ayat(2).
- Wewenang PPNS secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. karena itu ada kemungkinan diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, jika tidak maka PPNS yang bersangkutan dalam kegiatannya dapat berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Keterkaitan antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada garis besarnya terbagi atas dua bentuk, yakni :
 1. Koordinasi operasional meliputi pemberian petunjuk, pemberian bantuan penyidikan dan pengawasan;
 2. Hubungan pembinaan meliputi pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan dan pembinaan sistim laporan.
- Secara yuridis formal, PPNS hadir bukan sekedar pelengkap dan pengisi kekosongan tugas penyidik Polri yang tidak terjangkau, melainkan merupakan tuntutan dan kebutuhan nasional sebagai mitra penyidik Polri dalam menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

b. Saran-saran

Agar berbagai kasus tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap benda cagar budaya dapat ditangani dan diproses tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis menitip harapan dan saran sebagai berikut :

- Perlu ada peningkatan kualitas pengetahuan PPNS Cagar Budaya yang ada menyangkut identifikasi benda cagar budaya maupun pemahaman secara utuh Undang - Undang No. 5 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya, melalui penataran dan atau se-macamnya.
- Sebaiknya ada alokasi dana khusus untuk kegiatan PPNS Cagar Budaya. ■

Nikolaus, SH. PPNS
Suaka Peninggalan Sejarah
dan Purbakala Sulselra.



Acara pengambilan sumpah PPNS Cagar Budaya Suaka PSP Sulselra tanggal 31 Januari 1995 di Aula Benteng Ujung Pandang. Dari kiri ke kanan: Ibrahim, M. Nawir, Manjakkali P, Alimuddin, SH dan Nikolaus Bokky, SH.

Memahami Alur Pemikiran Augustinus tentang Sejarah

Oleh : Muslimin A.R. Effendy

Untuk memahami pandangan Augustinus tentang sejarah salah satu jalan adalah melihatnya dalam konteks geografinya. Sebab menurut Da Costa L, kebanyakan karya yang dihasilkannya serta tulisannya yang berkaitan dengan filsafat sejarah cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dialami dalam perjalanan hidupnya.

Augustinus lahir 13 Nopember 354 AD, di Thogaste, NUmindia (sekarang menjadi desa Souk Akhrias, dekat batasan Timur Algeria, Afrika. Ia berdarah Afrika tetapi keluarganya mempunyai hubungan yang erat dengan penguasa-penguasa di Roma dan komunitas kristen di Thagaste. Bapaknya bernama Patricius, seorang kafir, pemilik tanah, pegawai menengah dan sebagai konsul daerah. Ibunya Monica yang umurnya lebih muda dari Patricius merupakan seorang kristen yang saleh. Augustinus mempunyai dua orang saudara yaitu Navigius yang diabadikan dalam bukunya *Cofesiones*, dan Perpetau yang memilih hidup sebagai biarawati.

Augustinus mendapat tempat dalam deretan nama-nama ilmuwan. Ia seorang ahli pidato, pemikir taistis yang ulung dan seorang filsuf sejarah. Namanya dikenang melalui tulisan-tulisannya seperti : *De Puichre et Apto* (380 AD), *Cofessiones* (397-400 AD), *De Trinitate* (416 AD), *Enrich hiri dien* (421 AD), dan *Retractutiones* (427 AD). Tulisannya yang

terkenal adalah yang berhubungan dengan filsafat sejarah, yaitu *De Civitate Dei* (tentang Kerajaan Allah : 413-426 AD). Menurut ukhuran waktu itu buah pena Augustinus begitu banyak sehingga seorang penulis pernah mengatakan "Mentitur qui setatum legisso fatetur" (adalah pendusta orang yang mengatakan bahwa ia telah membaca semua karyanya).

Faktor yang Mempengaruhi Visi Augustinus

Ada sejumlah faktor yang mempegaruhi pandangan Augustinus; Pertama, Manikeisme. Di Afrika Utara pada masa Augustinus, hidup dan berkembang suatu aliran keagamaan yang disebut "Manikeisme". Aliran ini diberi nama sesuai dengan nama pendirinya, Mani (215-277 AD). Mani mengambil unsur ajarannya dari tiga agama besar. Dari Zorostranisme, Mani mengambil dualisme yang menjadi dasar doktrinnya; Dari Budhisme ia mengambil kepercayaan reinkarnasi dan mungkin juga tata hidup yang dikenakan pada golongan Electi dalam Manikeisme; Dan akhirnya pada agama kristen Mani mengambil penghormatan kepada Yesus. Pandangan Mani yang keliru terhadap gereja menyebabkan sejumlah bapa gereja menamakan Manikeisme suatu sekte atau heresi agama kristen. Selain bersifat eloktik, Manikeisme juga bersifat gnostik, yakni agama

ini menganggap memiliki pengetahuan gnosis yang dapat mengantarkan manusia kepada keselamatan. Manikeisme juga bersifat misioner dan univesal karena menawarkan keselamatan bagi semua orang serta harus ditawarkan keseluruh dunia. Tetapi pengaruh manikeisme yang lebih besar kepada Augustinus ialah sifat dualisme manikeisme yang mengajarkan bahwa ada dua kekuatan yang bersifat kekal, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Kedua kekuatan ini berdampingan : Terang dan Gelap, Baik dan Buruk, Allah dan Materi. Kekuatan yang satu tak mengalahkan kekuatan yang lain, dan satu-satunya keunggulan kekuatan yang baik dari kekuatan yang jahat adalah dalam aturan moral dan dalam kenyataan bahwa, pada akhirnya ketika dunia ini berakhir, dan kekuatan yang baik dipisahkan dari kekuatan yang jahat, tak akan ada lagi pertentangan antara kedua kekuatan itu, dan tak akan ada lagi serangan dari kekuatan yang jahat terhadap kerajaan terang . Selama 11 tahun (373-384 AD) Augustinus menjadi penganut Manikeisme.

Selain Manikeisme Augustinus mempelajari juga pikiran penulis-penulis Roma seperti Cicero dan Hortensiusnya. Yang lebih membekas terhadap Augustinus adalah pandangan Filsuf Yunani terutama Neo-Platonisme dari Platinus dan tokoh-tokoh Neoplatinus lainnya. Menurut Platinus semua realita terdiri dari serentetan emanasi dari yang satu, sumber kekal dari segala sesuatu. Emanasi pertama adalah emanasi yang terjadi secara niscaya, yaitu emanasi dari Nou (budi-intelegensi), dan Emanasi yang kedua adalah emanasi dari psyche(jiwa) pada periferi dari jagad raya terdapat materi. Manusia sebagiannya termasuk dunia roh, sebagiannya lagi termasuk dunia materi.

Manikeisme dan Neo-Platonisme mempengaruhi Augustinus. Tetapi pengaruh itu yang lebih membentuk adalah bentuk

dualistis, tetapi tidak banyak mempengaruhi visinya sendiri. Faktor yang mempengaruhi isi pikiran Augustinus adalah iman Kristen, yang diperolehnya setelah dewasa, dan dihayatinya sampai meninggal.

Visi Augustinus Tentang Sejarah

Augustinus memakai titik pandang sejarah keselamatan sebagai titik tolak untuk menguraikan pandangannya mengenai sejarah profan. Sejarah keselamatan adalah sejarah dari rencana Tuhan, untuk menyelamatkan umat manusia dan realisasi dari rencana keselamatan itu. Sejarah keselamatan adalah sejarah yang ditandai dengan kebaikan, kerahiman dan pengampunan Allah disatu pihak, dan kejahatan, penyesalan dan tabiat umat manusia di pihak lain. Bangsa Ibrani mengalami keselamatan Allah khususnya melalui perbuatan dahsyatnya pada saat mereka menyeberangi laut merah. Orang lain, karena khususnya orang kristen mengalami keselamatan melalui hidup, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada satu segi keselamatan adalah suatu yang ada pada orang-orang beriman sekarang, berupa penyelamatan dan dosa dan dukacita. Pada segi lain keselamatan berarti kelak Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman dan pada kebinasaan dan maut. Masa antara kebangkitan Kristus dan Parusia adalah masa percobaan antara kebaikan dan kejahatan.

Sejarah profan adalah sebenarnya sejarah pertentangan universal antara papa (*Civitas Dei* - Kerajaan Allah) dan *Civitas Terrena* (Kerajaan Dunia). Kerajaan Allah adalah kerajaan kebaikan dengan segala aspeknya, dan kerajaan dunia adalah kerajaan kejahatan dengan segala segi yang buruk. Permusuhan dan pertentangan kedua kerajaan ini akan berlangsung terus sampai akhirnya akan dimenangkan oleh kerajaan Allah.

Sejarah dengan dua kerajaan yang bertentangan, Augustinus mengemukakan adanya dua macam cinta dan dua macam tipe manusia yang turut membentuk dua kerajaan itu. Kerajaan dunia dibentuk oleh cinta diri, yang lebih besar bahkan sampai menghina Tuhan. Cinta diri mencari hormat dan pujian dari manusia dan ditunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada diri. Dalam kerajaan yang dikuasai oleh rasa cinta diri para pangeran dan rakyatnya dikendalikan oleh cinta akan penguasa. Keberhasilan digantungkan kepada kekuatan diri, dalam kerajaan yang dikuasai oleh cinta akan Tuhan, para pangeran dan rakyatnya dikendalikan oleh saling cinta antara mereka masing-masing, rakyat menunjukkan cinta dalam bentuk ketaatan kepada penguasa, menunjukkan cintanya dalam bentuk karya dan pengabdian kepada rakyat dan kepentingannya. Mereka tidak menggantungkan kekuatan pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan.

Dua macam cinta yang turut membentuk dua kerajaan masih didampingi oleh dua tipe manusia. Kedua tipe manusia ini digambarkan lewat tokoh Kain dari Abel. Kain merupakan putera sulung, adalah warga dari kerajaan dunia, sedangkan Abel adalah warga dari kerajaan Allah. Orang yang berasal dari orang tua yang terhukum adalah Adam yang jahat dan bersifat daging dan baru kemudian ia menjadi baik dan bersifat rohani sesudah lahir kembali dalam keadaan kristen. Bila kedua kerajaan menempuh jalan melalui serentetan kematian dan kelahiran, maka warga dunia ini adalah dua putera sulung, dan sesudahnya barulah muncul kerajaan Allah, yaitu dia yang lahir kemudian (Abel) yang ditentukan oleh rahmat. yang justru membuat dia menjadi seorang asing di dunia ini. Tetapi serentak menjadikan dia kerajaan Allah di atas. Kedua tokoh manusia yang digambarkan lewat tokoh Kain dan Abel sebenarnya merupakan wakil

dari dua ras (dua kelompok manusia). Kelompok Kain adalah manusia yang hidup menurut daging dan kelompok Abel adalah manusia yang hidup menurut kehendak Allah dan ditakdirkan untuk memerintah sampai kekal bersama Allah. Dua kelompok manusia ini secara mistik boleh disebut dua kota, atau di dua kerajaan.

Kerajaan dunia adalah kerajaan yang penuh dengan palsu dan kebahagiaan sejati, konflik dan damai, nafsu dan pengorbanan, rasa ingat kepada orang lain, diri sendiri, kecurangan/keadilan, keresahan dan ketenangan, perhambaan dan kemerdekaan. Kebahagiaan sejati seorang penguasa tidak terletak pada keberhasilan menindas musuh-musuh penentangnya, atau lamanya ia memerintah. Penguasa akan memperoleh kebahagiaan sejati kalau ia memerintah dengan adil; kalau ia tidak mabuk karena pujian dan hormat yang diberikan kepadanya. Kalau ia menggunakan kekuasaannya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan memperluas kebaktian orang kepadanya, kalau ia menyegani, mencintai dan menyembah Tuhan; kalau ia lambat dalam menghukum namun cepat dalam mengampuni; dia melakukan semuanya bukan melalui kemuliaan dunia yang hampa melainkan demi cinta kebahagiaan yang sejati dan kekal.

Konflik dan damai merupakan ciri lain kerajaan dunia dikodratkan untuk tidak lestari, dunia mempunyai kebaikan yang akan menggembirakan warga-warganya. Tetapi kegembiraan itu tidak mampu membebaskan warganya dari penderitaan hidup. Antara kegembiraan yang diberikan dunia dan kesulitan hidup yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan terus terjadi semacam konflik dan damai silih berganti. Dalam kerajaan dunia akan terus terdapat pengorbanan dan nafsu, karena di samping penguasa yang adil terdapat penguasa yang kejam seperti Romulus yang

membunuh saudaranya sendiri, Remus. Dunia juga akan penuh dengan orang-orang yang mau mengorbankan diri dan segala apa yang ada padanya demi kepentingan sesama. Namun kaum egois juga terus berkeliaran di dunia. Ketenangan pun akan terus berdampingan dengan keresahan, karena ketenangan sejati hanya terdapat di dalam kerajaan Allah, di dalam Allah sendiri. Ketenangan di dunia ini hanya bersifat sementara, sesuai dengan manusia dan kerajaan dunia ini yang bersifat sementara juga.

Kerajaan Allah di dunia mempunyai watak supra rasional. Orang yang tidak beriman mencari rasa damai dalam keuntungan-keuntungan duniawi dalam hidup ini. Orang yang beriman melihat keuntungan dalam hidupnya sebagai sarana untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan hidup, seperti ziarah menuju kehidupan kekal yang dijanjikan. Jadi keuntungan yang penuh di dunia digunakan oleh dua kelompok, manusia yang berbeda pula. Kerajaan dunia yang tidak hidup dari iman, mencari damai duniawi, dan tujuan yang hendak dicapainya adalah keserasian dari ketaatan dan aturan. Sedangkan kerajaan surga yang berziarah di atas dunia iman, menggunakan rasa damai di dunia. Karena itu biarpun ia hidup mereka hidup di dunia bawah, mereka tidak berkeberatan menjalankan aturan dari dunia atas. Dan karena itu dia terikat pada suatu bangsa tertentu, melainkan berada di atas segala bangsa dan untuk segala bangsa, maka kerajaan Allah itu bersifat suprarasional.

Penutup

Pandangan Augustinus tentang sejarah merupakan sintese dari tiga pengaruh, yakni Manikeisme dan Neo-Platonisme, pengalaman dan refleksi pribadi serta iman dan agama yang dianut terakhir. Pandangan Augustinus tentang sejarah bersifat dualistis, karena ia menerima ajaran dualisme dari Manikeisme dan terutama

Neo-Platonisme. Pandangannya juga bersifat refleksif kontemplatif, karena apa yang dikemukakannya adalah hasil dari refleksi pengalaman. Pandangannya juga bersifat Theistis karena berkat iman kristen yang dianutnya ia menempatkan Tuhan sebagai pelaku utama dan serentak pemenang dalam sejarah yang penuh konflik.

PUSTAKA

John K. Ryan,

The Compassions Di. St. Augustinus, Translated with an Introduction and Notes (New York: Double Day & Company Inc. 1960

Gerald Bonner,

St. Augustinus Of Hippo, Life and Controversies, London Scm, Press Ltd. 1964

Dagebert D. Runes,

Dictionery of Philosopy, Totowa Little Field, Adams Co. 1977

William Ebenstein,

"St. Augustinus the City of God", dalam; William Ebenstein(ed), *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York: Helt Rine Hart and Winston, 1960

Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikannya dengan cara pengaialian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah..

Pasal 12(1) UU No. 5 Th 1992 tentang BCB.

membunuh saudaranya sendiri, Remus. Dunia juga akan penuh dengan orang-orang yang mau mengorbankan diri dan segala apa yang ada padanya demi kepentingan sesama. Namun kaum egois juga terus berkeliaran di dunia. Ketenangan pun akan terus berdampingan dengan keresahan, karena ketenangan sejati hanya terdapat di dalam kerajaan Allah, di dalam Allah sendiri. Ketenangan di dunia ini hanya bersifat sementara, sesuai dengan manusia dan kerajaan dunia ini yang bersifat sementara juga.

Kerajaan Allah di dunia mempunyai watak supra rasional. Orang yang tidak beriman mencari rasa damai dalam keuntungan-keuntungan duniawi dalam hidup ini. Orang yang beriman melihat keuntungan dalam hidupnya sebagai sarana untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan hidup, seperti ziarah menuju kehidupan kekal yang dijanjikan. Jadi keuntungan yang penuh di dunia digunakan oleh dua kelompok, manusia yang berbeda pula. Kerajaan dunia yang tidak hidup dari iman, mencari damai duniawi, dan tujuan yang hendak dicapainya adalah keserasian dari ketaatan dan aturan. Sedangkan kerajaan surga yang berziarah di atas dunia iman, menggunakan rasa damai di dunia. Karena itu biarpun ia hidup mereka hidup di dunia bawah, mereka tidak berkeberatan menjalankan aturan dari dunia atas. Dan karena itu dia terikat pada suatu bangsa tertentu, melainkan berada di atas segala bangsa dan untuk segala bangsa, maka kerajaan Allah itu bersifat suprarasional.

Penutup

Pandangan Augustinus tentang sejarah merupakan sintese dari tiga pengaruh, yakni Manikeisme dan Neo-Platonisme, pengalaman dan refleksi pribadi serta iman dan agama yang dianut terakhir. Pandangan Augustinus tentang sejarah bersifat dualistis, karena ia menerima ajaran dualisme dari Manikeisme dan terutama

Neo-Platonisme. Pandangannya juga bersifat refleksif kontemplatif, karena apa yang dikemukakannya adalah hasil dari refleksi pengalaman. Pandangannya juga bersifat Theistis karena berkat iman kristen yang dianutnya ia menempatkan Tuhan sebagai pelaku utama dan serentak pemenang dalam sejarah yang penuh konflik.

PUSTAKA

John K. Ryan,

The Compassions Di. St. Augustinus, Translated with an Introduction and Notes (New York: Double Day & Company Inc. 1960

Gerald Bonner,

St. Augustinus Of Hippo, Life and Controversies, London Scm, Press Ltd. 1964

Dagebert D. Runes,

Dictionery of Philosophy, Totowa Little Field, Adams Co. 1977

William Ebenstein,

"St. Augustinus the City of God", dalam; William Ebenstein(ed), *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York: Helt Rine Hart and Winston, 1960

Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikannya dengan cara pengaialian, penyelaman, pengangkutan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah..

Pasal 12(1) UU No. 5 Th 1992 tentang BCB.

Publikasi/Informasi

Bertempat di gedung Wanita Kabupaten Dati II Barru, telah berlangsung pameran kepurbakalaan dari tanggal 26 - 29 Juli 1995. Pameran ini merupakan pameran ke-19 yang diadakan di setiap daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Dengan thema "Melestarikan BCB Dati II Barru Sebagai Realisasi Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992, menyongsong Indonesia emas". Dalam pameran ini ditampilkan benda-benda cagar budaya dari periode prasejarah sampai kolonial, bukti-bukti tertulis tentang kerajaan Tanete Barru serta foto-foto situs peninggalan sejarah dan purbakala Sulselra. Semuanya disertai dengan inskripsi, dan petunjuk singkat. Pameran ini dibuka secara resmi oleh Bupati KDH Tk. II Barru - Drs. Makkasau Razak dihadiri oleh unsur Muspida dan Ketua Dharma Wanita Tk. II Barru disaksikan pula oleh beberapa kepala UPT dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Sulsel. Kakanwil Depdikbud propinsi Sulsel diwakili oleh Koordinator Administrasi - Drs. Abu Bakar.

Pada tanggal 19 - 25 Oktober 1995 kembali digelar pameran peninggalan sejarah dan purbakala di arena Benteng Somba Opu. Pameran ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Pekan Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel V dan hari jadi Sulsel ke-326. Materi pameran terdiri dari panel-panel foto tentang situs peninggalan sejarah dan purba-kala Sulselra dan juga koleksi benda dari periode Islam hingga kolonial.

Pemugaran

Pemugaran merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian bangunan-bangunan purbakala dengan jalan memperbaikinya untuk dikembalikan kepada bentuknya semula.

Pada tahun anggaran 1995/ 1996 Suaka PSP Sulselra telah melakukan pemugaran terhadap salah satu Bastion Benteng Balang Nipa di kabupaten Sinjai, dinding timur Benteng Somba Opu di kabupaten Gowa dan dinding timur Benteng Wolio di Kabupaten Buton propinsi Sulawesi Tenggara. Pemugaran juga dilakukan terhadap gedung bangunan yang terdapat di dalam benteng Balang Nipa kabupaten Sinjai, gedung bangunan No. XVI di dalam Benteng Ujung Pandang yang terletak di Kodya Ujung Pandang dan pemugaran terhadap Bangunan, Mesjid Tua Lamuru di kabupaten Bone.

Melengkapi kegiatan pemugaran, dilaksanakan pemetaan di Benteng Sanrobone kabupaten Takalar dan kompleks makam Tinggi Mae kabupaten Gowa.

Pemeliharaan

Dalam tahun anggaran 1995/ 1996 kelompok Pemeliharaan telah melakukan peremajaan tanaman hias pada kompleks makam Hasanuddin, kompleks Benteng Ujung Pandang dan di kompleks makam Raja-raja Tallo. Selain kegiatan tersebut, kelompok pemeliharaan di bawah bimbingan tim konservasi juga berhasil mencegah kerusakan

Publikasi/Informasi

Bertempat di gedung Wanita Kabupaten Dati II Barru, telah berlangsung pameran kepurbakalaan dari tanggal 26 - 29 Juli 1995. Pameran ini merupakan pameran ke-19 yang diadakan di setiap daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Dengan thema "Melestarikan BCB Dati II Barru Sebagai Realisasi Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992, menyongsong Indonesia emas". Dalam pameran ini ditampilkan benda-benda cagar budaya dari periode prasejarah sampai kolonial, bukti-bukti tertulis tentang kerajaan Tanete Barru serta foto-foto situs peninggalan sejarah dan purbakala Sulselra. Semuanya disertai dengan inskripsi, dan petunjuk singkat. Pameran ini dibuka secara resmi oleh Bupati KDH Tk. II Barru - Drs. Makkasau Razak dihadiri oleh unsur Muspida dan Ketua Dharma Wanita Tk. II Barru disaksikan pula oleh beberapa kepala UPT dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Sulsel. Kakanwil Depdikbud propinsi Sulsel diwakili oleh Koordinator Administrasi - Drs. Abu Bakar.

Pada tanggal 19 - 25 Oktober 1995 kembali digelar pameran peninggalan sejarah dan purbakala di arena Benteng Somba Opu. Pameran ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Pekan Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel V dan hari jadi Sulsel ke-326. Materi pameran terdiri dari panel-panel foto tentang situs peninggalan sejarah dan purba-kala Sulselra dan juga koleksi benda dari periode Islam hingga kolonial.

Pemugaran

Pemugaran merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian bangunan-bangunan purbakala dengan jalan memperbaikinya untuk dikembalikan kepada bentuknya semula.

Pada tahun anggaran 1995/ 1996 Suaka PSP Sulselra telah melakukan pemugaran terhadap salah satu Bastion Benteng Balang Nipa di kabupaten Sinjai, dinding timur Benteng Somba Opu di kabupaten Gowa dan dinding timur Benteng Wolio di Kabupaten Buton propinsi Sulawesi Tenggara. Pemugaran juga dilakukan terhadap gedung bangunan yang terdapat di dalam benteng Balang Nipa kabupaten Sinjai, gedung bangunan No. XVI di dalam Benteng Ujung Pandang yang terletak di Kodya Ujung Pandang dan pemugaran terhadap Bangunan, Mesjid Tua Lamuru di kabupaten Bone.

Melengkapi kegiatan pemugaran, dilaksanakan pemetaan di Benteng Sanrobone kabupaten Takalar dan kompleks makam Tinggi Mae kabupaten Gowa.

Pemeliharaan

Dalam tahun anggaran 1995/ 1996 kelompok Pemeliharaan telah melakukan peremajaan tanaman hias pada kompleks makam Hasanuddin, kompleks Benteng Ujung Pandang dan di kompleks makam Raja-raja Tallo. Selain kegiatan tersebut, kelompok pemeliharaan di bawah bimbingan tim konservasi juga berhasil mencegah kerusakan

membunuh saudaranya sendiri, Remus. Dunia juga akan penuh dengan orang-orang yang mau mengorbankan diri dan segala apa yang ada padanya demi kepentingan sesama. Namun kaum egois juga terus berkeliaran di dunia. Ketenangan pun akan terus berdampingan dengan keresahan, karena ketenangan sejati hanya terdapat di dalam kerajaan Allah, di dalam Allah sendiri. Ketenangan di dunia ini hanya bersifat sementara, sesuai dengan manusia dan kerajaan dunia ini yang bersifat sementara juga.

Kerajaan Allah di dunia mempunyai watak supra rasional. Orang yang tidak beriman mencari rasa damai dalam keuntungan-keuntungan duniawi dalam hidup ini. Orang yang beriman melihat keuntungan dalam hidupnya sebagai sarana untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan hidup, seperti ziarah menuju kehidupan kekal yang dijanjikan. Jadi keuntungan yang penuh di dunia digunakan oleh dua kelompok, manusia yang berbeda pula. Kerajaan dunia yang tidak hidup dari iman, mencari damai duniawi, dan tujuan yang hendak dicapainya adalah keserasian dari ketaatan dan aturan. Sedangkan kerajaan surga yang berziarah di atas dunia iman, menggunakan rasa damai di dunia. Karena itu biarpun ia hidup mereka hidup di dunia bawah, mereka tidak berkeberatan menjalankan aturan dari dunia atas. Dan karena itu dia terikat pada suatu bangsa tertentu, melainkan berada di atas segala bangsa dan untuk segala bangsa, maka kerajaan Allah itu bersifat suprarasional.

Penutup

Pandangan Augustinus tentang sejarah merupakan sintese dari tiga pengaruh, yakni Manikeisme dan Neo-Platonisme, pengalaman dan refleksi pribadi serta iman dan agama yang dianut terakhir. Pandangan Augustinus tentang sejarah bersifat dualistis, karena ia menerima ajaran dualisme dari Manikeisme dan terutama

Neo-Platonisme. Pandangannya juga bersifat refleksif kontemplatif, karena apa yang dikemukakannya adalah hasil dari refleksi pengalaman. Pandangannya juga bersifat Theistis karena berkat iman kristen yang dianutnya ia menempatkan Tuhan sebagai pelaku utama dan serentak pemenang dalam sejarah yang penuh konflik.

PUSTAKA

John K. Ryan,

The Compressions Di. St. Augustinus, Translated with an Introduction and Notes (New York: Double Day & Company Inc. 1960

Gerald Bonner,

St. Augustinus Of Hippo, Life and Controversies, London Scm, Press Ltd. 1964

Dagebert D. Runes,

Dictionery of Philosopy, Totowa Little Field, Adams Co. 1977

William Ebenstein,

"St. Augustinus the City of God", dalam; William Ebenstein(ed), *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York: Helt Rine Hart and Winston, 1960

Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikannya dengan cara pengaialian, penyelaman, pengangkutan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah..

Pasal 12(1) UU No. 5 Th 1992 tentang BCB.

obyek cagar budaya dengan melakukan konservasi pada sejumlah situs seperti Tedong-tedong (Polmas), Bola Soba (Bone), makam Raja-raja Tallo (Ujung Pandang), kompleks makam Sultan Hasanuddin dan masjid Katangka Gowa.

Perlindungan

Pada tahun anggaran 1995/ 1996 telah dilaksanakan pemagaran atas 27 situs di kabupaten Takalar, Majene, Gowa (masing-masing 4 situs), Bulukumba (2 situs), Bone (3 situs), Soppeng, Sinjai dan Jeneponto (3), dan Maros 7 situs. Selain pemagaran juga dilakukan upaya penyelamatan berupa ekskavasi dan survei. Survei dilaksanakan terhadap temuan yang diduga sebagai perahu kuno di kabupaten Majene, dan ekskavasi penyelamatan terhadap kompleks pemakaman wadiah Takbuncini, Takalar. Sementara itu, PPNS sebagai aparat penyidik hukum di bidang cagar budaya telah berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1992 tentang BCB, di antaranya;

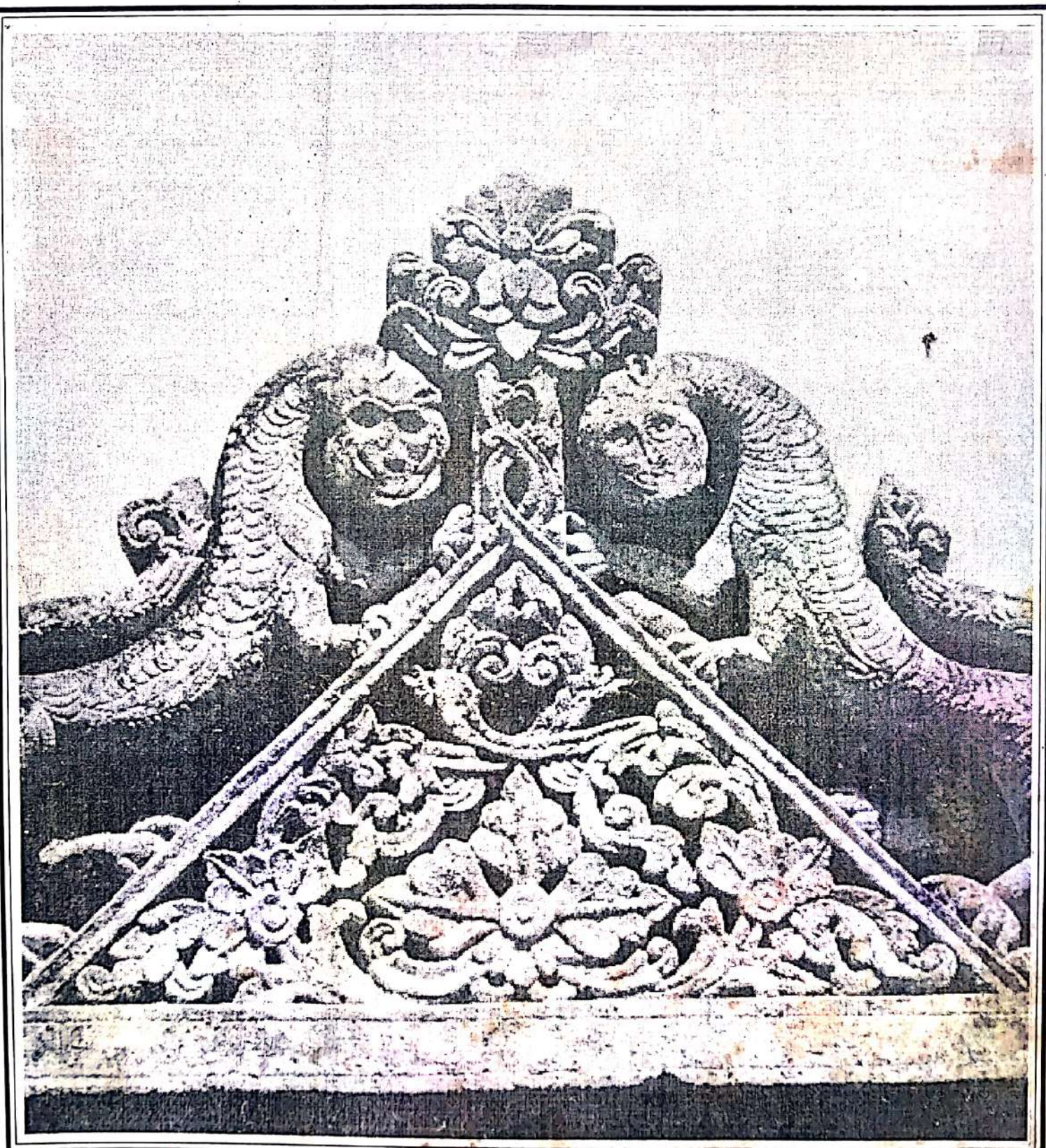
kasus pengrusakan pagar dan pemakaman baru di kompleks makam Jera Palette kabupaten Takalar. Penyelesaian kasus ini melibatkan instansi terkait, dalam hal ini korwas PPNS Dit Serse Polda Sulselra dan Pemda Tk. II kabupaten Takalar. Kasus pencurian patung nisan di kompleks makam Raja-raja Binamu dan makam Joko Jeneponto. Penyidikan pihak berwajib terhadap kasus tersebut belum tuntas dan barang bukti sampai kini belum ditemukan.

Kasus pencurian mayat kering di kabupaten Tana Toraja berhasil diselesaikan berkat kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian di sana. Atas pertimbangan keamanan mayat kering tersebut dibawa ke Ujung pandang untuk dikonservasi oleh tim Suaka PSP Sulselra. Kasus penggalian tanpa izin di kabupaten Gowa yang melibatkan tersangka Daeng Baco. Pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya No. 66/PIP.S/1995 PN. SUNGG tanggal 26 September 1995 menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara terhadap pelaku.

Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 26 UU No.5 Tahun 1992 tentang BCB

Somba Opu.



Relief Harimau pada gunung Makam Pelengkei Dg. Lagu,
di Kompleks Makam Raja-raja Binamu
Kabupaten Jeneponto - Sulawesi Selatan